



RENSTRA

KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2023-2026



PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Akhirnya, semoga Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, 20 Juni 2022

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



JUNAEDI, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	I-7
1.2	Landasan Hukum.....	I-10
1.3	Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.4	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-13
1.5	Sistematika Penulisan.....	I-14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kab. Adm. Kepulauan Seribu.....	II-1
2.1.1	Tugas.....	II-1
2.1.2	Fungsi.....	II-1
2.1.3	Struktur Organisasi.....	II-3
2.2	Sumber Daya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-6
2.2.1	Sumber Daya Manusia.....	II-6
2.2.1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	II-6
2.2.1.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	II-8
2.2.1.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-9
2.2.1.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	II-11
2.2.1.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	II-13
2.2.2	Sarana dan Prasarana (Aset/Modal).....	II-14
2.2.3	Lingkup Pelayanan.....	II-16
2.2.4	Mitra dalam Pemberian Pelayanan.....	II-17
2.3	Kinerja Pelayanan Kab. Adm. Kepulauan Seribu Periode 2017-2022.....	II-18
2.3.1	Capaian Indikator Kinerja.....	II-18
2.3.2	Realisasi Anggaran.....	II-21
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-25
2.4.1	Tantangan.....	II-26
2.4.1.1	Bencana Alam.....	II-26
2.4.1.2	Kerusakan Lingkungan.....	II-26
2.4.1.3	Keterbatasan Air Bersih dan Listrik.....	II-27
2.4.1.4	Kondisi Transportasi dan Dermaga.....	II-29
2.4.1.5	Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.....	II-30
2.4.1.6	Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi.....	II-31
2.4.1.7	Kondisi Ketahanan Pangan.....	II-32
2.4.2	Peluang.....	II-33
2.4.2.1	Dukungan Peraturan Perundang-undangan.....	II-33
2.4.2.2	Potensi Perekonomian.....	II-34
2.4.2.3	Partisipasi Masyarakat.....	II-35
2.4.2.4	Potensi Pariwisata.....	II-36



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	III-1
3.1.1	Permasalahan Makro Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	III-2
3.1.2	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	III-3
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD 2005-2025.....	III-8
3.2.1	Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025.....	III-8
3.2.2	Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025.....	III-10
3.3	Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional dan Regional.....	III-12
3.3.1	Isu Global.....	III-12
3.3.2	Isu Nasional.....	III-14
3.3.3	Isu Regional.....	III-15
3.4	Telaahan Arah Pengembangan Kepulauan Seribu.....	III-17
3.4.1	Konsep Pengembangan Wisata.....	III-17
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	IV-1
-----	---	------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	V-1
5.1.1	Strategi.....	V-3
5.1.2	Arah Kebijakan.....	V-3

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	VI-1
-----	---	------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	VII-1
-----	--	-------

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Proses Penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2023-2026.....	I-9
Gambar	1.2	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-14
Gambar	2.1	Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-5
Gambar	2.2	Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2021.....	II-21
Gambar	3.1	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	III-17
Gambar	3.2	Diversifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Unggulan Kepulauan Seribu.....	III-18
Gambar	3.3	Ragam Penyelenggaraan Event Festival.....	III-19
Gambar	3.4	Peta Pariwisata Sejarah dan Heritage.....	III-20
Gambar	3.5	Pengembangan Pulau Seribu Warna.....	III-22
Gambar	3.6	Kondisi Eksisting Aktivitas Dermaga Transportasi Air.....	III-27
Gambar	3.7	Konsep Pembangunan Terapung (<i>Floating</i>).....	III-28
Gambar	3.8	Pulau Tidung Kecil dan Jembatan Cinta.....	III-29
Gambar	3.9	Agro Wisata dan Museum Kerangka Paus Pulau Tidung Kecil.....	III-29
Gambar	3.10	Alur Penetapan Isu Strategis Kabupaten.....	III-30
Gambar	4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.....	IV-2
Gambar	6.1	Konsep Penguatan Peran Walikota/Bupati melalui Penataan Kawasan.....	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Setkab.....	II-6
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan Kelurahan.....	II-7
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Setkab.....	II-8
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan Kelurahan..	II-9
Tabel	2.5	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Setkab.....	II-9
Tabel	2.6	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan.....	II-10
Tabel	2.7	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Setkab.....	II-12
Tabel	2.8	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan Kelurahan....	II-12
Tabel	2.9	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	II-13
Tabel	2.10	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2021.....	II-14
Tabel	2.11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018-2021.....	II-16
Tabel	2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2018-2021.....	II-19
Tabel	2.13	Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun Anggaran 2018-2021.....	II-22
Tabel	2.14	Kondisi Instalasi Pengolahan Air Bersih di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021.....	II-28
Tabel	2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan	II-35
Tabel	2.16	Sektor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021.....	II-36
Tabel	2.17	Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu 2017-2021.....	II-38
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	III-2
Tabel	3.2	Identifikasi Permasalahan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi....	III-3
Tabel	3.3	Isu Strategis Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2023-2026.....	III-31
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	IV-3
Tabel	5.1	Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal....	V-2
Tabel	5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-4
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	VI-5
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.....	VII-2
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.....	VII-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dalam menjalankan pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh Wakil Gubernur, Deputi dan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan.

Mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tahun 2022, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut akan diisi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022 hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka Gubernur DKI Jakarta harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah (PD) juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan sebuah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai unsur pembantu

Gubernur, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, meliputi : Urusan pemerintahan bidang sosial; Urusan pemerintahan bidang perpustakaan; Urusan pemerintahan bidang kearsipan; Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; Urusan pemerintahan bidang kehutanan; Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan; dan Fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

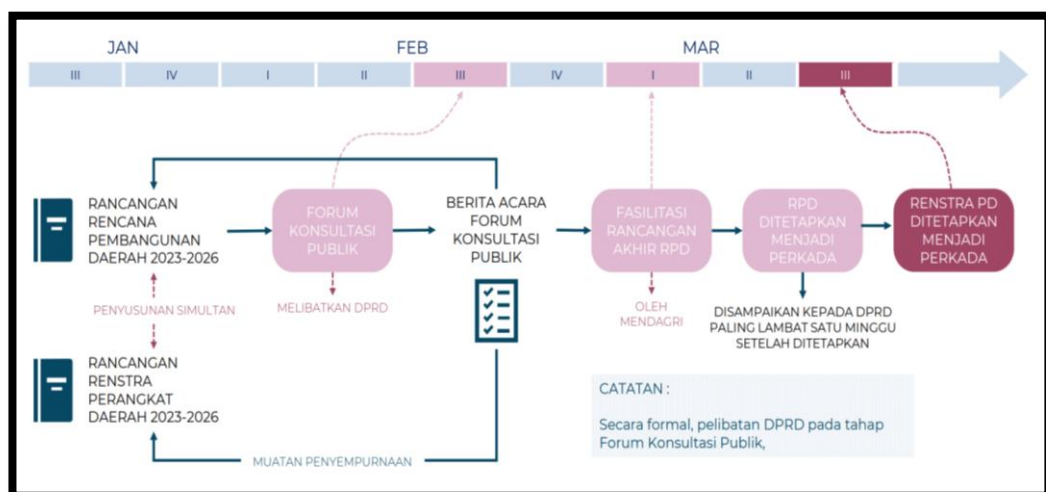
Sehubungan dengan penyusunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, maka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai sebuah perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.

Renstra Kabupaten Administrasi Tahun 2023-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan/sub kegiatan, dan kinerja urusan akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu setiap tahunnya mulai tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun proses penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik (Forum Perangkat Daerah);
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
5. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai dengan penetapan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2023-2026

Dengan disusunnya Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 maka seluruh entitas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan

kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026, digunakan sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 17) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
- 20) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 62041);
- 21) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013).



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2023-2026 adalah untuk menentukan tujuan, sasaran, program/kegiatan/sub kegiatan, dan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan bersifat asumsi serta indikatif.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2023-2026 antara lain :

1. Menjamin keselarasan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2023-2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.4 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 sangat terkait dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini juga akan dijadikan pedoman bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyusunan rencana kerja mulai tahun 2023. Untuk lebih jelasnya keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Daerah, serta sistematika penulisan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi kondisi geografis, demografis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban umum, dan lainnya. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan terkait tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, lingkup pelayanan, mitra pelayanan, dan capaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2017-2022 serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kab. Adm. Kepulauan Seribu

Dalam bab ini akan diuraikan terkait tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; telaahan visi, misi RPJPD 2005-2025; telaahan terhadap Isu-Isu Global, Nasional dan Regional; serta telaahan Arah Pengembangan Kepulauan Seribu. Selanjutnya akan dilakukan penentuan Isu-Isu Strategis sesuai kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran yang ditentukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, serta memperhatikan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan isu strategis.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini akan diuraikan terkait strategi dan arah kebijakan yang merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini akan dijelaskan terkait dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan periode sebelumnya, isu strategis, dan lainnya serta mempedomani Kepmendagri Nomor 050-5889/2021.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kabupaten Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;



- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana sarana pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
- j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
- o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kabupaten Administrasi;
- p. fasilitasi pengelolaan KORPRI Kabupaten Administrasi;
- q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.



Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi :

- a. sosial;
- b. perpustakaan;
- c. kearsipan;
- d. kepemudaan dan olahraga;
- e. kehutanan;
- f. pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan;
- g. fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati

c. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian terdiri dari:
 - 1) Subbagian Hukum;
 - 2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Korpri Kabupaten.
2. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan protokol;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3.) Subbagian Perlengkapan.

- b) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
- c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perekonomian; dan
 - 2) Subbagian Pembangunan.

d. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari :

- 1. Seksi Sosial;
- 2. Seksi Pemuda dan Olahraga; dan
- 3. Seksi Perpustakaan dan Kearsipan.

e. Unit Kerja Teknis 2, teridiri dari :

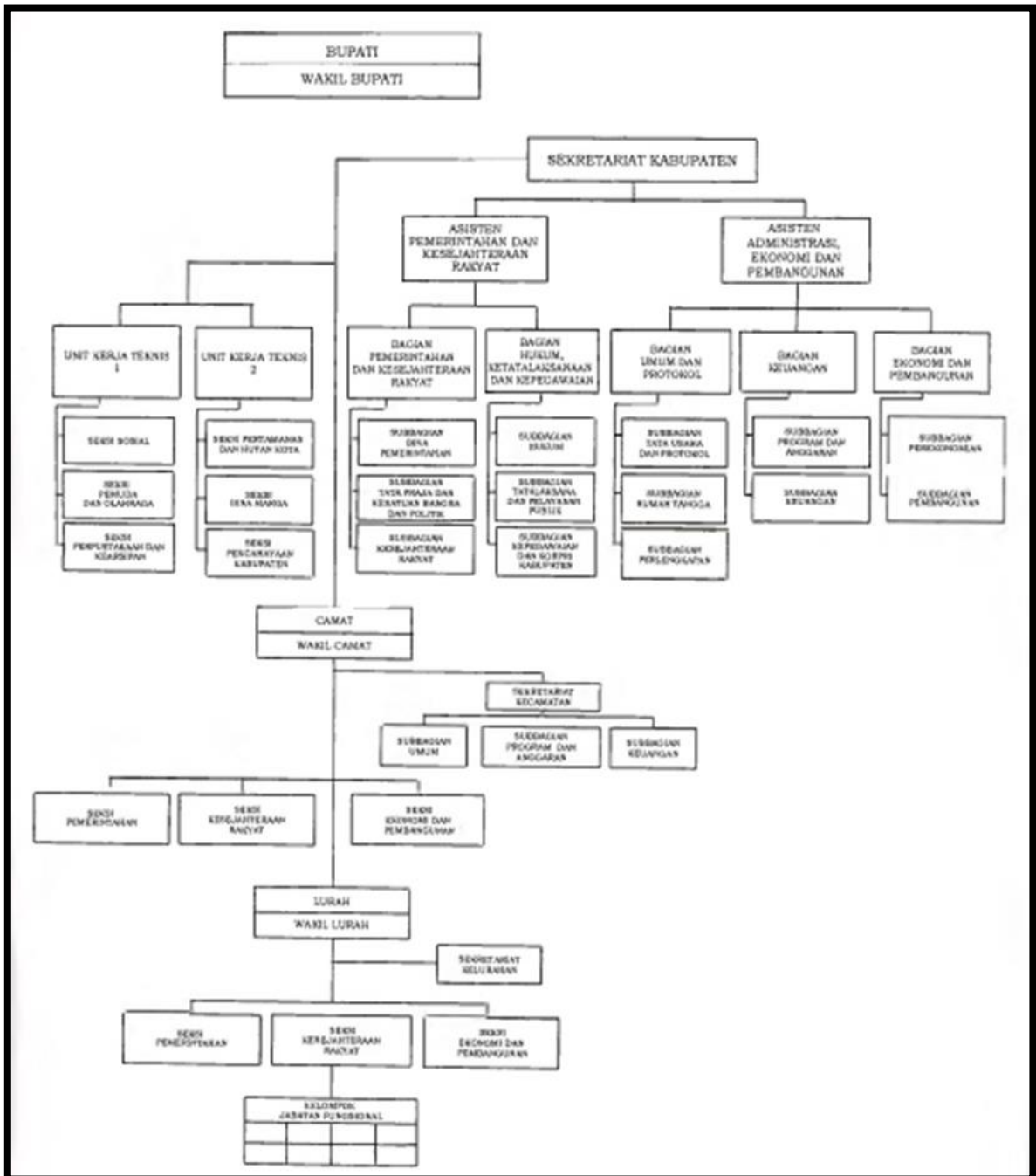
- 1. Seksi Pertamanan dan Hutan Kota;
- 2. Seksi Bina Marga; dan
- 3. Seksi Pencahayaan Kabupaten.

f. Kecamatan, terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Wakil Camat;
- 3) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
- 4) Seksi Pemerintahan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- 7) Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Lurah;
 - b) Wakil Lurah;
 - c) Sekretariat Kelurahan;
 - d) Seksi Pemerintahan,;
 - e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi sebagaimana Gambar 2.1. berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.2. Sumber Daya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Januari 2022, jumlah total pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya sebanyak 201 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 16 orang, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 13 orang, kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 11 orang, kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 10 orang, kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 18 orang. Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 20-25 tahun yaitu sebanyak 8 (delapan) orang.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022**

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Bupati	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Wakil Bupati	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Sekretaris Kabupaten	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	1	-	-	1
6	Unit Kerja Teknis 1	-	4	1	1	2	2	2	12
7	Unit Kerja Teknis 2	1	1	2	1	2	2	4	13
8	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2	2	1	1	2	-	5	13

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
9	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	2	2	3	1	1	-	2	11
10	Bagian umum dan Protokol	2	4	1	2	3	6	5	23
11	Bagian Keuangan	1	2	2	2	-	1	2	10
12	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	-	3	-	3	2	3	-	11
TOTAL		8	18	10	11	13	16	22	98

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Adapun jumlah total pegawai di dua kecamatan sebanyak 30 orang (Tabel 2.2), dimana pegawai paling banyak berumur lebih dari 50 tahun yakni 16 orang, pegawai umur 46-50 tahun sebanyak 2 (dua) orang, umur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, umur 36-40 tahun sebanyak 2 (dua) orang, umur 31-35 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, umur 26-30 tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan umur 20-25 tahun sebanyak 1 (satu) orang.

Sedangkan jumlah total pegawai di seluruh kelurahan yang ada di Kab. Adm. Kep. Seribu sebanyak 73 orang (Tabel 2.2). Pegawai paling banyak berumur lebih dari 50 tahun yakni 25 orang, pegawai umur 46-50 tahun sebanyak 15 orang, umur 41-45 tahun sebanyak 12 orang, umur 36-40 tahun sebanyak 16 orang, umur 31-35 tahun sebanyak 2 (dua) orang dan umur 26-30 tahun sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kecamatan	1	2	3	2	4	2	16	30
2	Kelurahan	-	3	2	16	12	15	25	73
Total		1	5	5	18	16	17	41	103

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara umum pegawai di Sekretariat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan berada dalam kategori usia produktif untuk memberikan pelayanan kepada warga di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai yang berpotensi memasuki masa pensiun (berumur >50 tahun) sehingga perlu disiapkan pegawai yang akan menggantikannya.

2.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu terbanyak menempati golongan III sebanyak 47 orang, dan golongan II sebanyak 34 orang, kemudian golongan IV sebanyak 15 orang serta pegawai yang menempati golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022**

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Bupati	-	-	-	1	1
2	Wakil Bupati	-	-	-	1	1
3	Sekretariat Kabupaten	-	-	-	1	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	1	1
5	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	1	1
6	Unit Kerja Teknis 1	-	4	6	2	12
7	Unit Kerja Teknis 2	-	5	8		13
8	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	4	7	2	13
9	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	-	2	8	1	11
10	Bagian Umum dan Protokol	2	11	7	3	23
11	Bagian Keuangan	-	4	5	1	10
12	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	-	4	6	1	11
TOTAL		2	34	47	15	98

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Sedangkan pegawai di seluruh Kecamatan paling banyak menempati golongan III sejumlah 18 orang, untuk golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang dan golongan II sebanyak 9 orang, sementara itu tidak ada pegawai yang menempati golongan I (Tabel 2.4).

Adapun pegawai di seluruh kelurahan paling banyak menempati golongan III sejumlah 43 orang dan golongan II sejumlah 30 orang. Sementara itu tidak ada pegawai yang menempati golongan I dan IV (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan	-	9	18	3	30
2	Kelurahan	-	30	43	-	73
	Total	-	39	61	3	103

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

2.2.1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.5 sebagian besar pegawai Sekretariat Kab. Kep. Seribu adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 42 orang sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 16 orang, SMA sebanyak 24 orang, dan SMP sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA/SPK	D3	S1/D4	S2	
1	Bupati	-	-	-	-	-	1	1
2	Wakil Bupati	-	-	-	-	-	1	1
3	Sekretariat Kabupaten	-	-	-	-	-	1	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA/SPK	D3	S1/D4	S2	
5	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	1	1
6	Unit Kerja Teknis 1	-	-	2	2	7	1	12
7	Unit Kerja Teknis 2	-	-	6	2	5		13
8	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	1	1	2	8	1	13
9	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	-	-	-	2	8	1	11
10	Bagian Umum dan Protokol	-	-	12	2	7	2	23
11	Bagian Keuangan	-	-	1	3	3	3	10
12	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	-	-	2	3	4	2	11
TOTAL			1	24	16	42	15	98

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Sedangkan pegawai di seluruh kecamatan didominasi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 16 orang, selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sebanyak 6 (enam) orang, SMA/SMK sebanyak 5 (lima) orang, dan S2 sebanyak 3 (tiga) orang (Tabel 2.6).

Adapun pegawai di seluruh kelurahan didominasi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 37 orang, selebihnya memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 28 orang, D3 sebanyak 4 (empat) orang, S2 sebanyak 3 (tiga) orang, dan SMP sebanyak 1 (satu) orang (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA/SMK	D3	D4/S1	S2	
1	Kecamatan	-	-	5	6	16	3	30
2	Kelurahan	-	1	37	4	28	3	73
	Total		1	42	10	44	6	103

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 50% ke atas telah memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas atau dengan kata lain pegawai Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukan permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Namun demikian, pegawai di Kecamatan dan Kelurahan masih didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan dibawah S1, sehingga dalam perspektif kedepan perlu adanya peningkatan kemampuan, kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan dengan meningkatkan tingkat pendidikan pegawai.

2.2.1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Saat ini jabatan struktural yang tersedia di Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu seluruhnya telah terisi (Tabel 2.7). Pegawai yang menempati eselon II sebanyak 3 (tiga) orang, eselon III sebanyak 9 (Sembilan) orang dan eselon IV sebanyak 18 orang, sedangkan sisanya adalah fungsional pelaksana sebanyak 68 orang. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

**Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	3
2	Eselon III	9
3	Eselon IV	18
4	Fungsional Tertentu	0
5	Fungsional Pelaksana	68
Total		98

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Sedangkan untuk kelurahan dan kecamatan seluruh jabatan struktural telah terisi, eselon III di kecamatan sejumlah 6 (enam) orang, eselon IV sejumlah 12 orang dan fungsional pelaksana sebanyak 12 orang. Adapun untuk eselon IV di kelurahan sejumlah 29 orang, kemudian untuk fungsional pelaksana di kelurahan sebanyak 44 orang. Lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Eselon					Jumlah
		Fungsional Pelaksana (Staf)	Fungsional Tertentu	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	
1	Kecamatan	12	-	12	6	-	30
2	Kelurahan	44	-	29	-	-	73
Total		56	-	41	6	-	103

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

2.2.1.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebesar 91,46% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebesar 8,54%. Kondisi demikian menggambarkan bahwa Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi DKI Jakarta untuk variabel keterlibatan perempuan sebagai pegawai di pemerintahan. Secara numerik dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Bupati		1	1
2	Wakil Bupati		1	1
3	Sekretariat Kabupaten		1	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	1
5	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan		1	1
6	Unit Kerja Teknis 1	5	7	12
7	Unit Kerja Teknis 2	2	11	13
8	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4	9	13
9	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	4	7	11
10	Bagian umum dan Protokol	3	20	23
11	Bagian Keuangan	1	9	10
12	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	1	10	11
TOTAL		20	78	98

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu khususnya dalam fungsi teknis.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi, utamanya dalam jumlah peralatan computer masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Secara rinci dapat dilihat pada table 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu s/d Tahun 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kapal Kabupaten	28	1	10	17	
2	Kendaraan roda 4	14	-	11	3	
3	Kendaraan roda 2	13	-	6	7	
4	Germor	5	-	2	3	
5	AC Chiller	1	1	-	-	
6	AC Split	120	-	120	-	
7	AC Portable / Standing Floor	4	4	-	-	
8	Peralatan kantor :	-	-	-	-	
	- Komputer PC	24	-	24	-	
	- Printer	41	-	20	21	
9	APAR	19	19	-	-	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Tahun 2021

Terkait sarana gedung Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Rumah Dinas Jabatan dan Mess Karyawan, serta Kantor Perwakilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di wilayah darat perlu ditingkatkan kualitasnya agar kinerja organisasi lebih optimal.

Selanjutnya dari 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 2 kantor kecamatan dalam kondisi baik, namun untuk rumah dinas Camat hanya tersedia 1 gedung di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang dalam keadaan rusak sedang. Sedangkan untuk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sampai dengan saat ini belum memiliki rumah dinas jabatan sehingga perlu pembangunan rumah dinas Camat Kepulauan Seribu Utara.

Sementara itu, dari total 6 kantor kelurahan yang ada sebanyak 4 kantor kelurahan dalam kondisi baik. Hanya 2 kantor kelurahan dalam kondisi rusak sedang yakni Kantor Lurah Pulau Panggang (pembangunan tahun 2012) dan Kantor Lurah Pulau Tidung (pembangunan tahun 2012) yang sejauh ini hanya dilakukan pemeliharaan rutin/berkala sehingga diperlukan rehab kedua gedung tersebut.

Selanjutnya dari total 6 rumah dinas kelurahan yang ada sebanyak 4 rumah dinas kelurahan dalam kondisi baik. Hanya 1 rumah dinas kelurahan dalam kondisi rusak berat yakni Rumah Dinas Lurah Pulau Untung Jawa (pembangunan tahun 2003) dan Rumah Dinas Lurah Pulau Harapan (pembangunan tahun 2004) yang sejauh ini hanya dilakukan pemeliharaan rutin/berkala sehingga diperlukan rehab kedua gedung tersebut

Dengan demikian, kondisi sarana prasarana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dirasakan perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar kinerja organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.

2.2.3 Lingkup Pelayanan

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk di dalamnya pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan, antara lain:

- a. Layanan Ketertiban Umum (Tibum);
- b. Layanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
- c. Layanan Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
- d. Layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. Layanan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. Layanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
- g. Layanan Sosial;
- h. Layanan Perpustakaan;
- i. Layanan Kearsipan;
- j. Layanan Kepemudaan dan Olahraga;
- k. Layanan Kehutanan (Pertamanan dan Pemakaman);
- l. Layanan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Bidang Jalan; dan
- m. Layanan Penyelenggaraan Pencahayaan Kabupaten.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur, setiap tahun dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. SKM menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**Tabel 2.11 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018-2021**

Tahun	Target	Nilai IKM	Kategori
2021	86	87,72	Baik "B"
2020	86	86,08	Baik "B"
2019	83	83,64	Baik "B"
2018	80	86,01	Baik "B"

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2022

Dari tahun 2018-2021, IKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu cenderung meningkat dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan semakin membaik. Namun demikian, tetap perlu ditingkatkan juga pelayanan yang tidak termasuk dalam penilaian tetapi berdampak kepada masyarakat.

2.2.4 Mitra dalam Pemberian Pelayanan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat maka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak bisa secara mandiri melaksanakan pelayanan terutama yang bersifat teknis. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bekerja sama dengan mitra baik unit kerja perangkat daerah (UKPD) maupun dengan melibatkan pihak swasta/perusahaan.

UKPD dalam lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu berjumlah 31 unit. UKPD tersebut yaitu 1 Inspektorat Pembantu, 1 Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 14 Suku Dinas, 2 Suku Badan, 2 Unit Pengelola/ Penyelenggara Dinas Perhubungan dan 1 Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Sementara itu, mitra kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang menjadi binaan yaitu terdiri dari 2 Unit Kerja Teknis Kabupaten, 2 kecamatan dan 6 kelurahan.

Mitra kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari swasta/ perusahaan yang berkontribusi dalam pemberian pelayanan terutama berasal dari perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Hal ini sejalan dengan Pergub Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk optimalisasi program pembangunan daerah.

Adanya TSLDU di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selama kurun waktu 2017-2021 setidaknya dapat mengoptimalikan program pembangunan yang ada sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Untuk itu, perlu dioptimalkan koordinasi dengan pelaku usaha untuk dapat melaksanakan TSLDU secara berkelanjutan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2017-2022

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.12. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 22 indikator kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu rata-rata masuk dalam interpretasi Sangat Tinggi.

Terdapat 2 indikator kinerja yang hanya dilakukan di tahun 2018 karena masa transisi yakni Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi dan Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

Selebihnya untuk indikator lainnya dilakukan pada tahun 2019-2022, sedangkan khusus indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional dan Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan tetap dilakukan pada tahun 2018-2022.



Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2018-2021

No	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Ket
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
I.	Indikator Sasaran														
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan)	Indeks	-	3	3	4	-	4	4	4	-	100%	100%	100%	
II.	Indikator Program														
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi	%	80	-	-	-	86,02	-	-	-	100%	-	-	-	Transisi
2	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	%	80	-	-	-	86,02	-	-	-	100%	-	-	-	Transisi
3	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	3	3	3	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	
4	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	3	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	%	-	85	90	95	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
6	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	-	85	90	95	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	-	85	90	95	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
8	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	-	84	85	86	-	92,75	83,32	N/A	-	100%	98,02%	N/A	
9	Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	%	-	85	85	90	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
10	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	-	80	85	90	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
11	Jumlah Kawasan yang Tertata	Kawasan	-	1	1	2	-	0	0	0	-	0%	0%	0%	
12	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Indeks	-	3	3	4	-	4	4	4	-	100%	100%	100%	
13	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat	%	-	80	85	90	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
14	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	%	-	85	90	95	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
15	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	%	-	80	85	90	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
16	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	%	-	85	90	95	-	75	100	100	-	88,24%	100%	100%	
17	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	%	-	95	95	95	-	100	100	100	-	100%	100%	100%	
18	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	%	-	85	90	95	-	94,28	99,56	95,83	-	100%	100%	100%	
19	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	-	85	90	95	-	96,94	100	100	-	100%	100%	100%	
20	Jumlah Kantor/Rumah Dinas Lurah dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	%	-	-	4	4	1	-	0	3	100%	-	0%	75%	
21	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	%	1	-	1	1	2	-	0	0	100%	-	0%	0%	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	-	3	3	4	-	4	4	N/A	100%	100%	100%	N/A	

Sumber : Data Monev SIPJMD 2017-2022 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



Berdasarkan Tabel 2.12 tersebut dapat diketahui bahwa dari 22 indikator kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu rata-rata masuk dalam interpretasi Sangat Tinggi. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja tersebut adalah tetap dilaksanakannya sebagian besar kegiatan rutin meskipun anggaran kegiatan tersebut terdampak kebijakan Rasionalisasi/Refocusing APBD 2020, sehingga sebagian besar target kinerja tercapai dan terlaksana sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Selain itu juga pada tahun 2020 terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai (0%) dengan interpretasi sangat rendah yakni indikator Jumlah Kantor/Rumah Dinas Lurah dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar, Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar serta Jumlah Kawasan yang Tertata. Indikator kinerja tersebut tidak dapat tercapai karena anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut dimatikan/ terdampak kebijakan Rasionalisasi/Refocusing APBD 2020 dampak Pandemi COVID-19.

Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 2 Indikator Kinerja yang realisasinya tidak dapat diukur (N/A) yakni :

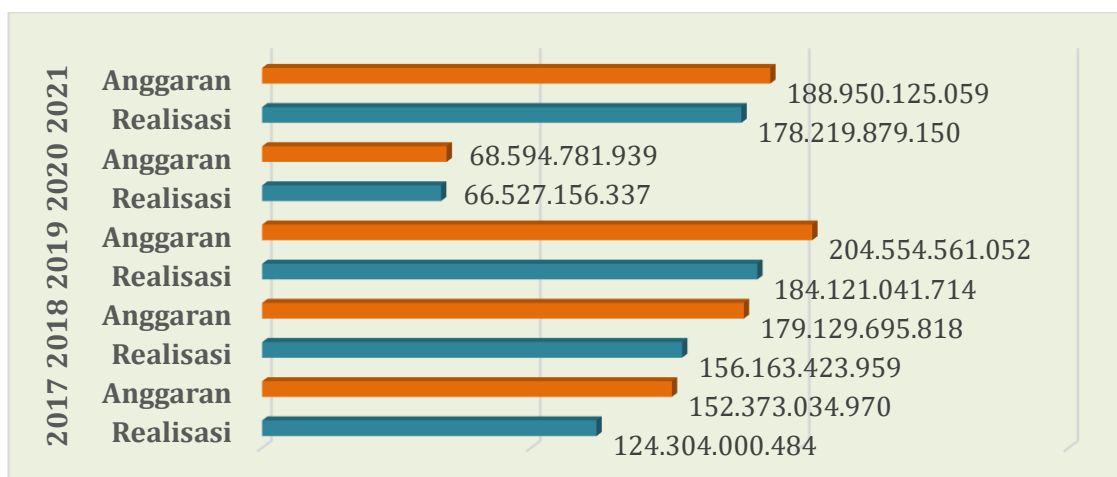
1. Indikator Kinerja ***“Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu”***. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terhadap kegiatan Jumantik Kelurahan, Posyandu Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) pada tanggal 23 September 2021, yang menyepakati bahwa sehubungan dengan masih tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, dan penerapan status PPKM Level 4 di Provinsi

DKI Jakarta, telah disepakati terkait dengan Pelaksanaan SKM Kota/Kabupaten Administrasi dilaksanakan hanya pada 2 bidang yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan PPSU.

2. Indikator Kinerja **“Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia”**. Sesuai Surat Direktur Jenderal KEMENKUMHAM Nomor: HAM-HA.02.02-17 untuk sementara program/kegiatan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 ditiadakan.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang diterima oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Anggaran paling besar yang diterima yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 204.554.561.052 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung). Anggaran ini naik jika dibandingkan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, anggaran yang diterima paling rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 68.594.781.939 (Belanja Langsung). Hal ini dampak dari kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.



**Gambar 2.2. Anggaran dan Realisasi
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2021**

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2022

Secara detail, target dan realisasi anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun Anggaran 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai berikut :



Tabel 2.13 Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun Anggaran 2018-2021

Program	Tahun Anggaran											
	2018			2019			2020			2021		
	Anggaran (BL)	Realisasi (BL)	Persentase	Anggaran (BL)	Realisasi (BL)	Persentase	Anggaran (BL)	Realisasi (BL)	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	6.978.339.345	5.902.656.356	84,59%	23.437.593.372	18.315.217.316	78,14%	8.884.076.521	8.372.951.170	94,25%			
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	14.358.477.527	12.246.940.952	85,29%	28.164.455.222	23.093.878.989	82,00%	13.546.771.370	13.054.602.325	96,37%			
Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	24.900.472.298	19.706.972.807	79,14%									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	58.346.747.648	45.753.672.193	78,42%									
Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				57.781.800.774	53.321.131.473	92,28%	37.849.963.385	36.892.542.243	97,47%			
Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				7.262.552.287	4.416.685.860	60,81%	1.308.187.875	1.293.840.478	98,90%			
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				11.654.200.397	10.379.518.260	89,06%	7.005.782.788	6.913.220.121	98,68%			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										2.204.186.143	1.931.827.300	87,64%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa										277.179.770	236.053.000	85,16%
Program Pembinaan Perpustakaan										881.535.330	866.781.678	98,33%
Program Penanganan Bencana										124.832.640	49.764.000	39,86%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)										707.595.157	506.165.698	71,53%
Program Pengelolaan Kecamatan										41.457.015.027	38.871.124.959	93,76%
Program Pengelolaan Kota Administrasi										6.191.819.822	5.239.218.195	84,62%
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan										264.178.276	255.016.590	96,53%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										260.521.595	243.589.000	93,50%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										393.600.000	371.775.000	94,46%
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan										333.704.240	319.676.600	95,80%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										102.434.034.467	98.399.462.195	96,06%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)										7.002.319.392	4.932.202.040	70,44%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										26.417.603.200	25.997.222.895	98,41%
Grand Total	104.584.036.818	83.610.242.308	79,95%	128.300.602.052	109.526.431.898	85,37%	68.594.781.939	66.527.156.337	96,99%	188.950.125.059	178.219.879.150	94,32%

Sumber : Data E-Monev Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018-2021



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan program pada periode tahun anggaran 2018-2021. Pada tahun 2018 merupakan periode transisi pergantian Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat 4 program. Realisasi anggaran program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar 79,95%. Salah satu anggaran yang berdampak signifikan terhadap rendahnya realisasi anggaran tahun 2018 adalah tidak terrealisasikannya pengadaan kapal angkutan jenazah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Selain itu juga terdapat nilai efisiensi hasil lelang kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pada tahun 2019 terdapat 5 program yang diampu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Realisasi anggaran program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar 85,37%. Realisasi anggaran tahun 2019 tidak dapat terserap maksimal karena terdapat sisa efisiensi hasil lelang dan terdampak Kebijakan Efisiensi Anggaran mulai bulan Oktober sampai dengan Desember sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019. Beberapa anggaran yang berdampak signifikan terhadap rendahnya realisasi anggaran tahun 2019 antara lain :

1. Kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki realisasi 0%, dikarenakan anggaran dimatikan mengingat tidak terjadi permasalahan hukum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Kegiatan Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki realisasi 0%, dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran;
3. Kegiatan Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki realisasi 64,97%, dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun kegiatan tetap dilaksanakan meskipun tanpa anggaran;

Selanjutnya serapan anggaran tahun 2020 Sangat Tinggi karena adanya monitoring dan evaluasi kegiatan pasca kebijakan Rasionalisasi/ Refocusing APBD 2020, sehingga terlaksana sesuai jadwal pelaksanaan. Disisi lain realisasi anggaran kegiatan tidak dapat terserap maksimal karena terdapat nilai efisiensi sisa hasil pengadaan barang/jasa.

Pada tahun anggaran 2021, nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di dalam Renja 2021 juga terdapat beberapa kegiatan baru yang tidak ada di dalam Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pelimpahan kewenangan yang ada di Unit Kerja Teknis Kabupaten.

Pada tahun 2021 tersebut terdapat 14 program yang diampu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. dari 14 program tersebut terdapat 11 program yang memiliki capaian serapan anggaran di atas 75%. Namun disisi lain masih terdapat 3 program yang capaian serapan anggarannya berada dibawah 75% yakni : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 71,53%, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 70,44%, dan Program Penanganan Bencana sebesar 39,86%

Beberapa sub kegiatan yang memiliki realisasi anggaran terendah dan berpengaruh signifikan terhadap rendahnya pencapaian target anggaran ketiga program pada Triwulan 4 tersebut antara lain :

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki realisasi 71,53%, dikarenakan adanya efisiensi dari selisih harga yang cukup signifikan pada komponen belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Meskipun demikian target kinerja (output) dari Sub Kegiatan tersebut mencapai 100%;

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki realisasi 70,44%, dikarenakan adanya efisiensi dari selisih harga yang cukup signifikan pada komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Selain itu juga terdapat efisiensi terhadap Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor dalam pendistribusian Material Pencahayaan Kota;
3. Penyediaan Makanan (belanja Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk Penanganan Kebencanaan) yang memiliki realisasi 0,00%, dikarenakan sepanjang tahun anggaran 2021 tidak terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sehingga target kinerja dan anggaran kegiatan kebencanaan tidak direalisasikan. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan tetap mengalokasikan pagu anggaran kebencanaan pada tahun-tahun anggaran berikutnya sebagai kegiatan yang bersifat antisipatif dalam penanganan kebencanaan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Kepulauan Seribu, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

2.4.1.1 Bencana Alam

Perubahan iklim dunia berdampak terhadap kondisi wilayah di belahan dunia. Berdasarkan data dari Unit Kerja Teknis (UKT) 1 Kabupaten, bahwa di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu rawan bencana angin puting beliung. Pada tahun 2018 tercatat 75 rumah rusak diterpa angin puting beliung. Bencana angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2018 tersebut terjadi di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka dengan jumlah kerusakan terbanyak terdapat di Pulau Panggang. Kantor Kelurahan Pulau Panggang juga menjadi korban kerusakan akibat angin puting beliung.

Lebih lanjut Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga rawan terhadap banjir rob, dimana pada tahun 2021 banjir rob mengakibatkan Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan terendam dengan ketinggian 5-30 cm. Pada tahun yang sama, banjir rob juga terjadi di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yakni di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari dan Pulau Tidung dengan ketinggian air 10-30 cm.

Dengan demikian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesiapsiagaan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana dapat ditekan.

2.4.1.2 Kerusakan Lingkungan

Seiring dengan pertambahan aktifitas masyarakat, bertambah juga potensi bertambahnya kerusakan lingkungan. Pada tahun 2020 terdapat kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Pulau Tidung Kecil. Hal ini disebabkan oleh Kapal Tongkang yang menabrak terumbu karang di wilayah perairan Pulau Tidung Kecil. Selain itu adanya fenomena abrasi yang dipicu oleh penebangan hutan bakau yang tidak terkontrol mengakibatkan luas pulau semakin menyusut dan beberapa bagian pulau terendam. Dengan demikian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sehingga dampak kerugian terhadap lingkungan dari aktifitas dapat diminimalisir.

2.4.1.3 Keterbatasan Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih dan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, kebutuhan listrik di pulau penduduk (kecuali Pulau Sabira) disuplai dengan menggunakan kabel bawah laut circuit II dari Gardu Hubung Tanjung Pasir Tangerang dengan 20 Mega Volt Ampere (MVA).

Kondisi keterbatasan listrik terlihat jelas di Pulau Sabira. Pulau Sabira merupakan wilayah pemukiman penduduk yang secara geografis letaknya paling jauh dari Ibukota Jakarta. Pasokan listrik di wilayah tersebut saat ini sudah disuplai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 400 kWp yang beroperasi selama 12 jam dan sisanya masih menggunakan Mesin Genset untuk mengaliri listrik satu pulau dengan luas pulau 8,82 Ha yang dioperasikan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk Pulau-Pulau Ressort bahkan masih mengandalkan tenaga dari mesin genset yang dioperasikan secara mandiri dan belum mendapatkan suplai listrik dari PT PLN (Persero).

Keterbatasan air bersih untuk mandi maupun air layak konsumsi hampir terjadi di seluruh pulau pemukiman penduduk. Kondisi yang sangat memprihatinkan terlihat di Pulau Panggang dan Pulau Kelapa dengan kadar garam air tanah yang sangat tinggi sehingga tidak layak dimanfaatkan untuk mandi maupun konsumsi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UKPD terkait telah berupaya membangun *Reverse Osmosis (RO)* di sejumlah pulau pemukiman, namun debit air bersih yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan belum dapat menjangkau seluruh pulau pemukiman. Berdasarkan data dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021, kondisi *existing* Instalasi Pengolahan Air *Reverse Osmosis (IPA-RO)* di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada Tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 2.14 Kondisi Instalasi Pengolahan Air Bersih di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021

No.	Lokasi	Metode Pengolahan	Kapasitas Output (Ltr/mnt)	Tahun dibangun	Pengelola
1.	Pulau Untung Jawa	BWRO	12 – 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	90	2016	PD. PAM
2.	Pulau Lancang	BWRO	12 – 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	90	2019	PD.PAM
3.	Pulau Pari	BWRO	12 - 25	2003	Sudin SDA
4.	Pulau Tidung	BWRO	10 - 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	180	2019	PD. PAM
5.	Pulau Payung	SWRO	15	2018	PD. PAM
6.	Pulau Pramuka	BWRO	15 - 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	90	2018	PD.PAM
7.	Pulau Panggang	BWRO	15 – 26	2003	Sudin SDA
		SWRO	180	2018	PD.PAM
8.	Pulau Karya	SWRO - BWRO	20 - 25	2016	Sudin SDA
9.	Pulau Harapan	BWRO	12 – 25	2003	Sudin SDA
10.	Pulau Kelapa	BWRO	14 - 24	2003	Sudin SDA
		SWRO	300	2019	PD. PAM
11.	Pulau Kelapa Dua	BWRO	10 – 20	2003	Sudin SDA
		SWRO	15	2018	PD. PAM
12.	Pulau Sabira	BWRO	8 – 20	2018	Sudin SDA
		SWRO	90	2021	Dinas SDA

Sumber : Suku Dinas Sumber Daya Air Kab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2021

Menyikapi data dan penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UKPD terkait perlu menyusun kegiatan strategis dalam peningkatan penyediaan air bersih layak konsumsi dan peningkatan penyediaan listrik di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Dengan demikian upaya tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pemerataan pembangunan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi dengan 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1.4 Kondisi Transportasi dan Dermaga

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 Destinasi Utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus mampu menjawab beberapa tantangan pencapaian indikator-indikator strategis pengembangan KSPN. Salah satunya adalah melalui peningkatan aksesibilitas (kemudahan akses transportasi dan dermaga) bagi wisatawan maupun bagi masyarakat.

Ketersediaan jumlah transportasi umum milik swasta dari dan menuju ke Kepulauan Seribu beberapa tahun terakhir ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Akses kapal menuju Kepulauan Seribu dapat ditempuh melalui Dermaga Marina Ancol, Muara Angke/Kaliadem, Kamal Muara, Tanjung Pasir, Sunda Kelapa, Keronjo dan Rawasaban. Dilihat dari segi estetika fisik bangunan dermaga-dermaga tersebut mayoritas besar dinilai masih kurang tertata rapi sebagaimana konsep pelabuhan kawasan pariwisata. Menyikapi hal tersebut, perlu koordinasi lintas SKPD/UKPD terkait untuk menyusun upaya strategis dalam peningkatan segi fisik dermaga yang representatif dan inovatif serta menyusun jadwal pelayaran kapal.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kajian *Detail Engineering Design* (DED) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk Dermaga yang ada di Pulau Sabira, Pulau Kelapa dan Pulau Pramuka. Sedangkan tahun 2021 telah dilaksanakan kajian *Detail Engineering Design* (DED) Rencana Induk

Pelabuhan (RIP) untuk Dermaga yang ada di Pulau Payung, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa.

Akses pelayaran lintas pulau pemukiman melalui konsep Trans Pulau Seribu perlu diupayakan oleh Pemerintah mengingat masyarakat di sejumlah pulau pemukiman terkendala akses pelayaran kapal antar pulau pemukiman sehingga tidak jarang masyarakat menyewa kapal.

Kondisi Dermaga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu saat ini terdapat beberapa yang mengalami kerusakan seperti di Pulau Pari dan Pulau Lancang. Selain itu juga kolam labuh yang ada di wilayah Kepulauan Seribu juga mengalami pendangkalan. Hal ini membutuhkan penanganan yang baik dikarenakan kolam labuh yang cukup dalam diperlukan oleh kapal, mengingat kapal merupakan satu-satunya alat transportasi yang digunakan untuk menghubungkan konektivitas antar pulau.

2.4.1.5 Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, tercatat jumlah rata-rata sampah di Kepulauan Seribu sebanyak ± 1.100 ton/bulan dengan persentase 70% merupakan sampah plastik. Sampah tersebut berasal dari penduduk Kepulauan Seribu, wisatawan Kepulauan Seribu serta berasal dari 13 muara sungai di wilayah sekitar yang terbawa arus laut menuju kawasan perairan Kepulauan Seribu.

Infrastruktur yang saat ini eksisting dalam pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu antara lain kapal pengangkut sampah, germor, L-Box, Insinerator, pencacah plastik, pembuat bijih plastik dan komposter. Akan tetapi hal ini masih dirasa jauh dari cukup dikarenakan masih banyaknya timbulan sampah yang belum tertangani. Selain itu penanganan sampah di Kepulauan Seribu masih bersifat konvensional yaitu dengan pengiriman sampah ke Bantar Gebang, belum diterapkannya metode penanganan sampah yang tepat dari hulu ke hilir, serta kurangnya kolaborasi dari para pihak untuk turut serta mengelola sampah di Kepulauan Seribu.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sampah di Kepulauan Seribu tergolong cukup memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut, SKPD/UKPD terkait perlu melakukan koordinasi dan menyusun upaya strategis dalam peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan Kepulauan Seribu. Alternative yang mungkin dapat dilakukan diantaranya :

- a) Pembangunan TPS 3R di tiap-tiap pulau;
- b) Pengembangan 2 Dermaga Transit pengelolaan sampah dengan konsep **Waste to Energy** dan Pusat Eduwisata Pengelolaan Sampah;
- c) Mekanisasi pengelolaan sampah seperti penggunaan alat berat;
- d) Pengadaan **Kapal Conveyor** penangkap sampah dan penanganan oil spil di perairan Kepulauan Seribu; dan lain-lain.

Untuk saat ini, yang telah dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Pengurangan sampah langsung dari sumbernya menargetkan partisipasi dari masyarakat. Pemilahan dan pengangkutan sampah oleh 26 Bidang Pengelolaan Sampah di tingkat RW yang berhasil mengurangi sampah sampai 17%.

2.4.1.6 Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan data dari Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik tahun 2017, Fasilitas jaringan komunikasi berupa *BTS (Base Transceiver Station)* telah terpasang disejumlah pulau pemukiman diantaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Harapan. Pulau yang belum terpasang jaringan komunikasi dan informasi *BTS* antara lain Pulau Sabira dan Pulau Payung.

Pada tahun 2020-2021, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Jaringan Telekomunikasi (WiFi) pada 114 titik jaringan yang tersebar di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu dengan rincian 85 titik layanan kantor pemerintah dan sekolah serta 29 titik di Pulau Kelapa, Harapan, Panggang, Untung Jawa dan Lancang. Selain itu di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga telah tersedia jaringan Telekomunikasi (WiFi) dari hasil *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada 3 titik jaringan yang tersebar di beberapa pulau penduduk.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kepulauan Seribu perlu melakukan percepatan dan pemerataan jaringan komunikasi khususnya internet di seluruh wilayah Kepulauan Seribu serta perlu optimalisasi kualitas jaringan komunikasi *BTS* yang telah terpasang.

2.4.1.7 Kondisi Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan di Kepulauan Seribu cukup terpenuhi namun perlu upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh yang menjangkau pulau-pulau pemukiman maupun pulau-pulau resort. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pulau Tematik Pertanian dan Perkebunan (Pulau Tidung Kecil/Agro Wisata);
- b. Pulau Tematik Pasar Tradisional (Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung);
- c. Pusat Cenderamata Kepulauan Seribu;
- d. Pulau Sentra Industri Pengolahan Ikan, Rumput Laut, Rajungan dan Garam (Pulau Sebira, Pulau Lancang dan Pulau Tidung);
- e. Penyimpanan Ikan Segar (*Cold Storage*) di seluruh Pulau Pemukiman;
- f. Dibangunnya JakGrosir di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (saat ini JakGrosir sudah ada di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yakni di Pulau Tidung Kecil).

2.4.2 Peluang

2.4.2.1 Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Keputusan Gubernur tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi, pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi urusan sosial, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bidang jalan, serta fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

Selain itu dengan ditunjuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 Destinasi Utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diharapkan dapat membuka peluang dalam pengembangan Kepulauan Seribu kedepannya.

2.4.2.2 Potensi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Percepatan pertumbuhan ekonomi juga didukung faktor geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, dan peranan pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling bersinergi.

Berdasarkan data dari BPS Kepulauan Seribu, menggunakan harga konstan 2010, nilai PDRB Kepulauan Seribu pada tahun 2020 mengalami perlambatan dari Rp. 3,90 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 3,71 triliun di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan PDRB sebesar minus 4,86 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai minus 0,90 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas produksi minyak dan gas dan hampir semua lapangan usaha di 17 kategori pembentuk PDRB Kabupaten. Namun demikian jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tanpa Migas masih dapat tumbuh sebesar minus 0,66 persen lebih tinggi daripada PDRB dengan Migas sebesar minus 4,86 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Seribu menunjukkan masih di pengaruhi faktor utama pertumbuhan dari Pertambangan dan Penggalan, dimana lapangan usaha ini ditahun 2020 melambat cukup dalam sebesar minus 6,43 persen. Tahun 2020 menjadi tahun dengan perlambatan ekonomi paling rendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Beberapa lapangan usaha yang masih tumbuh positif tinggi diantaranya Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan, dan Jasa Keuangan dengan masing-masing tumbuh; 9,23 persen; 7,03 persen; 6,26 persen.

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Harga Konstan

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	4,97	1,31	1,16	4,51	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	- 1,50	0,16	1,00	- 4,01	- 6,43
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	0,61	7,30	6,39	10,72	0,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,91	2,39	5,95	6,92	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	2,94	2,26	8,04	6,68	1,24
F	Konstruksi/Construction	7,34	6,46	3,36	8,65	- 1,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	9,63	6,09	6,05	9,92	0,55
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	7,53	5,94	6,39	9,28	- 4,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	4,82	7,17	4,15	8,86	- 13,88
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	13,87	10,27	9,08	9,24	9,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	9,79	5,24	1,10	15,41	6,26
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,76	4,67	4,80	5,07	- 4,99
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	9,50	9,52	7,32	6,93	- 0,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	4,38	- 4,35	9,07	5,25	- 1,01
P	Jasa Pendidikan/Education	6,04	1,91	6,01	6,80	2,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,90	7,67	4,09	13,33	7,03
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	9,89	8,19	7,36	10,93	1,03
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		0,19	1,27	1,87	- 0,90	- 4,86
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas /Gross Regional Domestic Product Without Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal		4,15	3,53	3,28	5,63	- 0,66

Sumber: BPS Kepulauan Seribu Tahun 2021

2.4.2.3 Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bermakna terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon dan berkontribusi terhadap hal-hal terkait pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam konteks partisipasi pemilihan umum, data KPU Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kepulauan Seribu merupakan yang tertinggi se-Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 82% dari total pemilih.

Kemudian dalam konteks partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), jumlah usulan dalam musrenbang menunjukkan peningkatan. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kepedulian masyarakat dalam berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Adanya partisipasi masyarakat ini menjadi peluang sebagai modal sosial dalam mewujudkan Jakarta yang ***Maju Kotanya, Bahagia Warganya***.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dari berbagai sektor kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut :

**Tabel 2.16 Sektor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021**

No	Sektor	Jenis
1.	Industri / Ekonomi	Perdagangan, IKM (makanan, kerajinan dan pembuatan kapal), Pengelolaan hasil laut, Daur Ulang
2.	Pariwisata	Usaha Penginapan / home stay, Biro Perjalanan / Travel, Transportasi, Catering, Pokdarwis / Pemandu Wisata, Penyewaan Peralatan Selam/ snorkeling
3.	Pendidikan	Bimtek Bagi Pelaku Usaha, Diklat Nakhoda, Diklat Ketrampilan dan Keahlian
4.	Seni dan Kebudayaan	Hadrah, Qasidah, Marawis, Tarian (Khas dari masing – masing pulau pemukiman)

Sumber : Bagian Pemerintahan dan Kesra. Kepulauan Seribu Tahun 2021

2.4.2.4 Potensi Pariwisata

Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025. Selain itu juga, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, dapat diketahui bahwa Kepulauan Seribu termasuk wilayah yang menjadi lokasi pembangunan destinasi pariwisata prioritas.

Dalam rencana tersebut Kepulauan Seribu dan sekitarnya diarahkan sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan bahari dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu sinergitas pengelolaan sumber daya terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Stakeholders terkait. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ini antara lain:

- a. Aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat dan ekonomi);
- b. Aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan);
- c. Aspek *biodiversity* (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.

Terhadap hal ini harus menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain:

- a. Perluasan zonasi pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu;
- b. Kemudahan perizinan usaha;
- c. Standarisasi material pembangunan yang dipersyaratkan;
- d. Daya Tarik investor;
- e. Potensi pendapatan Pusat/Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Komitmen menjaga keseimbangan ekosistem sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian, keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem di wilayah Kepulauan Seribu. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga diharapkan berlangsung secara adil dan merata untuk mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten. Kebutuhan/ permasalahan dalam rangka meningkatkan pariwisata yakni:

1. Kesiapan SDM kepariwisataan untuk menyambut kedatangan para wisatawan;
2. Belum adanya lokasi binaan/lokasi sementara atau outlet untuk memasarkan produk;
3. Perlunya peningkatan keterampilan dalam mengolah dan melakukan diversifikasi produk olahan hasil laut;
4. Perlunya dorongan kreatifitas masyarakat dalam menciptakan jenis usaha baru dan penguatan kapasitas SDM pelaku wisata;
5. Diversifikasi mata pencaharian (Mendorong nelayan agar beralih dari konsep nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya).

Lebih lanjut, perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 2017-2018 terjadi peningkatan dan kemudian menurun di tahun

2019. Jumlah wisatawan domestik pun juga mengalami penurunan dari semula sebanyak 850.629 orang pada tahun 2017 menjadi sebesar 650.332 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi wabah pandemic Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Di tahun tersebut jumlah wisatawan yang datang hanya berjumlah 237.421.

Di tahun 2021 pariwisata di Kepulauan Seribu juga masih belum pulih sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan masih terjadi penurunan yakni dengan total wisatawan yang berkunjung sebesar 174.430. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dari berbagai sektor, untuk mempercepat *recovery* pariwisata di Kepulauan Seribu sehingga pariwisata dapat bergeliat kembali. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.17 berikut:

Tabel 2.17 Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu 2017-2021

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	Jumlah Total (orang)
2017	28,731	850,629	879,360
2018	28,963	771,427	800,390
2019	25,418	624,914	650,332
2020	3,740	233,681	237,421
2021	3,725	170,705	174,430

Sumber : Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomim Kreatif Kepulauan Seribu Tahun 2021

Arah pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata internasional dan nasional, serta arah penataan wilayah yang tercantum dalam RPD menjadi peluang bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Perumusan isu-isu strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap RPJPD, RPJMN. Khusus pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 tidak menggunakan visi, misi, dan Janji Kerja Gubernur serta Wakil Gubernur, dikarenakan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, akan dilaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dampaknya, sejumlah daerah otonom termasuk Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dan diangkat penjabat Gubernur (untuk tingkat provinsi). Lebih lanjut, dilakukan telaah arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta periode 2005-2025. Analisis tahapan-tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sebagaimana Tabel 2.12 tentang pencapaian kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2018-2021 pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan kinerja yang optimal. Meskipun memang pada tahun 2020 terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target karena kebijakan refocusing anggaran sebagai dampak Pandemi COVID-19.

Lebih lanjut terdapat beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Makro Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbeda dengan wilayah kabupaten lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Bupati beserta perangkatnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang responsif dalam menyelesaikan tantangan dan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan, serta belum dapat secara cepat dan mandiri	1. Masih adanya rantai koordinasi yang panjang dengan Perangkat Daerah lain dalam menyelesaikan masalah dan kurangnya kewenangan kabupaten	1. Peraturan Gubernur No. 143 Tahun 2019 Tentang SOTK Kabupaten (Bupati lebih bersifat koordinatif dan hanya diberikan sebagian pelimpahan kewenangan di UKT Kabupaten);

melakukan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan peluang-peluang yang ada.	administrasi terhadap beberapa pelayanan (perizinan, dst) mengakibatkan terhambatnya peluang untuk kemajuan wilayah; 2. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan pemerintah;	2. Grand Design Kepulauan Seribu Pariwisata; 3. Zonasi Pemanfaatan Perairan; 4. Banyaknya Pemilik Kewenangan Dalam Pengelolaan Kepulauan Seribu (KLHK, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemen KKP).
---	---	--

3.1.2 Permasalahan Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pada bagian ini dijabarkan permasalahan-permasalahan berdasarkan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut dijabarkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas serta fasilitas pendukungnya	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	1. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKDM melalui pembinaan, dialog, dst.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Masih perlunya optimalisasi pemantauan, pengendalian dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	1. optimalisasi pemantauan, pengendalian dan penanganan gangguan tantrib
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	1. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
		5. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	1. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;
		6. Belum Optimalnya pelayanan terkait kesehatan, Pelaksanaan Kabupaten sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kabupaten	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kota Sehat di kabupaten, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS; 2. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan; 3. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 4. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ)
2	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1. Masih perlu peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum; 2. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kabupaten; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kabupaten; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia
		3. Belum optimalnya disiplin aparat;	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		4. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di Kabupaten administrasi, kelurahan dan kecamatan	1. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor Sekretariat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan
3	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi
		2. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan kantor dan indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pencapaian indeks kepuasan pelayanan kantor dan indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
4	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkannya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; 3. Peningkatan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
5	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	1. Masih perlu dioptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sarpras koperasi, UMKM dan perdagangan.	1. Dilakukan pembangunan, rehab ringan, rehab sedang, rehab berat dan perencanaan rehab sarpras koperasi, UMKM dan perdagangan;
		2. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kab. Adm. Kep. Seribu



No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat Kab. Adm. Kep. Seribu
			3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kab. Adm. Kep. Seribu
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kab. Adm. Kep. Seribu
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kab. Adm. Kep. Seribu
6	Unit Kerja Teknis 1	1. Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan
			2. Mengoptimalkan penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas terkait pelayanan sosial
			3. Mengoptimalkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
		2. Belum optimalnya prasarana dan sarana keolahragaan serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan tingkat Kabupaten Administrasi;	1. Mengoptimalkan penyediaan prasarana dan sarana olahraga di wilayah Kabupaten Administrasi; 2. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan kepaskibrakaan dan kepemudaan di wilayah Kabupaten Administrasi serta partisipasi event tingkat Provinsi



No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Belum optimalnya penyelenggaraan keperpustakaan masyarakat di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan	1. Mengoptimalkan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, serta Perpustakaan Masyarakat
			2. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kepulauan Seribu
			3. Mengoptimalkan pelaksanaan event Keperpustakaan tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi
7	Unit Kerja Teknis 2	1. Masih belum optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan pemakaman.	1. Mengoptimalkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
			2. Mengoptimalkan Pembangunan maupun Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
		2. Masih belum optimalnya Sarana Pendukung Pencahayaan Kota	1. Mengoptimalkan Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota
			2. Mengoptimalkan Penyediaan Armatur dan Komponen Pencahayaan Kota
			3. Mengoptimalkan Penyediaan Ornamen Pencahayaan Kota yang mendukung KSPN
		3. Masih belum optimalnya Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten	1. Mengoptimalkan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kepulauan Seribu
			2. Mengoptimalkan Pengecekan Keamanan Struktur Jalan Secara Berkala

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
8	Kecamatan	1. Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan dan kebudayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban,	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pelayanan ketentraman dan ketertiban; 4. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan dan kebudayaan tingkat kecamatan.
9	Kelurahan	1. Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, PSN) dan peningkatan kinerja PPSU	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; 5. Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025

3.2.1 Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan arahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta periode 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
2. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
3. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
6. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (leadership) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan.

3.2.2 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya;
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;

3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera;
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang;
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026. Dengan demikian diharapkan agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 dapat sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 maupun RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

3.3 Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional dan Regional

3.3.1 Isu Global

Isu global menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dinamika yang berkembang secara global perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Adapun beberapa isu global yang sedang berkembang saat ini antara lain :

A. Globalisasi Teknologi

Globalisasi teknologi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kecepatan difusi teknologi di seluruh ekonomi global. Hal ini mengacu pada penyebaran teknologi di seluruh dunia, dan khususnya dari negara maju ke negara berkembang.

Globalisasi teknologi terjadi pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini lantaran perkembangan yang pesat dalam inovasi teknologi di abad ke-21 dan adanya kemudahan akses untuk memindahkan teknologi ke seluruh ekonomi dunia. Kendati demikian, terdapat kekhawatiran bahwa globalisasi teknologi menimbulkan kesenjangan digital antara si kaya dan si miskin.

B. *Green Economy*

Green Economy berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang bersifat ramah lingkungan. Hal ini dilakukan karena terjadinya degradasi lingkungan yang semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

C. *Climate Change*

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.

Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya. Konsentrasi GRK yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

D. Pandemi Covid-19

Isu global yang sedang terjadi dan dialami oleh dunia saat ini yaitu covid-19 merupakan penyakit sebab dari coronavirus dalam penularannya, virus tersebut menjadi ancaman global, melihat pandemi tidak melihat batas-batas negara. Hadirnya Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Covid-19 telah menjangkiti jutaan orang sejak kasus pertama diumumkan.

Berbicara isu kesehatan global, karena kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan sangat menentukan bagi stabilitas pembangunan nasional yang pada saat ini dialami oleh dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

3.3.2 Isu Nasional

Isu nasional juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dinamika yang berkembang saat ini di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Adapun beberapa isu nasional yang sedang berkembang saat ini antara lain :

A. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

B. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan meningkatnya urbanisasi.

C. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkungan dan isu transformasi pelayanan publik ini mencakup profesionalitas ASN, pelayanan publik, kelembagaan, dan akuntabilitas.

E. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

3.3.3 Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)

A. Ketahanan Terhadap Bencana

Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap bencana banjir dan genangan. Hal ini disebabkan tingkat kemiringan lahan antara 0-3% dan terdapatnya 13 aliran sungai yang bermuara di laut utara Jakarta. Adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan.

Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Lebih lanjut di wilayah pesisir pantai dan wilayah kepulauan juga rawan terhadap banjir rob dengan ketinggian air 10-30 cm.

B. Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta pada 2021 termasuk kategori sangat tinggi dengan mencapai 81,11 atau tumbuh 0,42 persen dibandingkan pada 2020 sebesar 80,77. Angka IPM DKI Jakarta ini di atas angka IPM Indonesia yang sebesar 72,29. Namun demikian, kualitas pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta tetap harus ditingkatkan pada beberapa aspek seperti peningkatan literasi dan kualitas PAUD pada pendidikan serta pengendalian penyakit dan masalah gizi masyarakat pada kesehatan.

C. Ekonomi Inklusif

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun ini memberikan dampak dan perubahan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sempat melambat dan bahkan mengalami kontraksi, namun sejak Triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta kembali positif yang merupakan sinyal baik untuk pemulihan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

D. Kota Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang telah dulu ada.

E. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

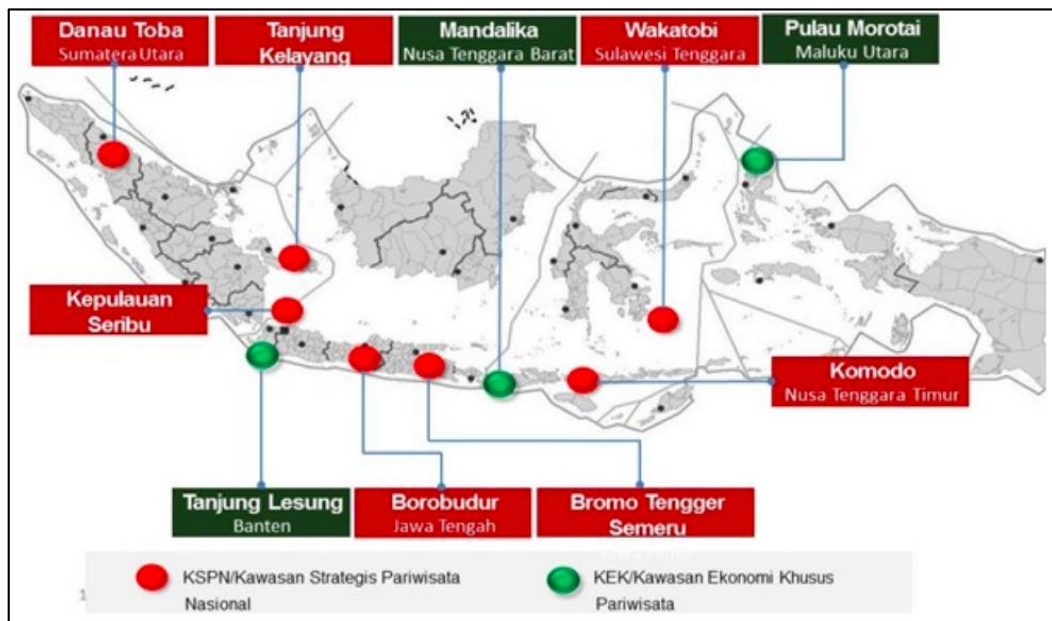
F. Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 14,87 persen dan di wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 6,78 persen pada tahun 2020, jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,69 persen. Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,51 persen, Jakarta Timur sebesar 4,16 persen, Jakarta Selatan 4,34 persen dan Jakarta Barat sebesar 4,25 persen. Disparitas lainnya yang menjadi parameter adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang masih pada angkat kisaran 70 yaitu sebesar 72,10, dimana IPM Provinsi sebesar 81,11. Sedangkan wilayah lain nilai IPM sudah berada di atas 80.

3.4 Telaahan Arah Pengembangan Kepulauan Seribu

3.4.1 Konsep Pengembangan Wisata

Berdasarkan PP 50 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden (Perpres) 58 Tahun 2017, Kepulauan Seribu merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

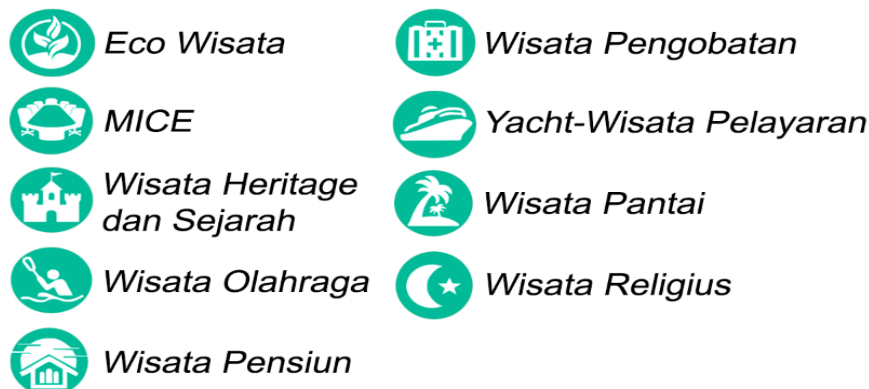


Gambar 3.1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Hal yang patut menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Kepulauan Seribu adalah bahwa pengembangan Kawasan Strategis Wisata Nasional sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dari sisi perizinan telah adanya pelayanan perizinan investasi yang terpusat satu pintu dengan prosedur perizinan yang mudah. Secara umum kestabilan ekonomi dalam negeri sangat mendukung adanya iklim investasi yang baik.

Tahun 2020-2022 merupakan saat-saat yang berat khususnya bagi sektor pariwisata yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan *recovery* pasca pembatasan-pembatasan yang sempat diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. *Recovery* tersebut diperlukan untuk mengembalikan pariwisata di Kepulauan Seribu. Untuk itu diperlukan juga keterlibatan investor untuk mengembangkan Kepulauan Seribu khususnya dibidang pariwisata.

Adapun peluang investasi pariwisata unggulan di Kepulauan Seribu sedikitnya terdapat 9 (sembilan) sub sektor pariwisata yakni :



Gambar 3.2 Diversifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Unggulan Kepulauan Seribu

Selain memiliki diversifikasi potensi pengembangan sub sektor pariwisata di atas, masih terdapat keunggulan komparatif yang dimiliki kepulauan seribu, yakni :

1. Lokasi berdekatan dengan bandar udara Internasional;
2. Dapat diakses langsung dari kota lain (Banten dan Lampung);

3. Memiliki banyak sumber daya alam dengan lingkungan asri dan pemandangan yang indah;
4. Memiliki potensi gas alam dan minyak;
5. Memiliki bangunan bersejarah, heritage budaya dan keindahan alam.

Lebih lanjut sebelum Pandemi Covid-19, Kepulauan Seribu secara rutin menjadi tempat penyelenggaraan event skala nasional, seperti :



Gambar 3.3 Ragam Penyelenggaraan Event Festival

Saat ini terdapat (5) lima pintu masuk ke Kepulauan Seribu, yakni :

1. Marina Ancol;
2. Kaliadem;
3. Sunda Kelapa;
4. Kalibaru;
5. Tanjung Pasir.

Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu adalah sebanyak 650.332 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebanyak 23.421 orang. Hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Di tahun 2021 juga masih mengalami penurunan menjadi sebanyak 174.430. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak untuk membangkitkan kembali pariwisata di Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, penjelasan beberapa aspek penting yang menjadi daya tarik wisata, maupun daya tarik investasi di Kepulauan Seribu antara lain :

1. Wisata Sejarah Heritage

Kisah cerita Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kelor dan Pulau Onrust adalah cerita yang paling membuat penasaran para wisatawan.



Gambar 3.4 Peta Pariwisata Sejarah dan Heritage

Pulau Cipir juga dikenal dengan sebagai Pulau Kahyangan. Pulau ini memiliki bangunan tua yang bersejarah, dimana didalamnya ada sebuah rumah sakit untuk jemaah haji yang sudah tidak difungsikan. Hal ini sangat menarik, terutama untuk yang memiliki jiwa berpetualang.

Pulau Bidadari memiliki benteng Martello peninggalan Kolonial Belanda, dimana banyak sekali wisatawan yang mengabadikan momen di Kepulauan Seribu dengan menjadikan benteng Martello sebagai ikon yang difoto.

Pulau Kelor memiliki bentuk yang unik seperti daun kelor. Namun meskipun memiliki ukuran yang kecil, Pulau Kelor memiliki sejarah yang dalam sebagai pulau yang digunakan oleh Belanda sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi serangan tentara Portugis. Disana juga memiliki benteng Martello yang menjadi tempat yang menarik wisatawan.

Pulau Onrust memiliki bangunan sejarah/heritage era Belanda dan Jepang, yang pada jaman Belanda merupakan tempat berlabuh kapal, sementara pada jaman Jepang digunakan untuk penjara. Gedung-gedung bersejarah masih berdiri kokoh di Pulau Onrust dan menjadi atraksi menarik bagi wisatawan.

Pulau Bidadari memiliki benteng Martello yang dibangun era kolonial Belanda, dimana banyak wisatawan yang sering mengabadikan momen kedatangannya di benteng Martello.

2. Rencana Pengembangan Pulau Seribu Warna

Dengan mengusung tema Pulau Seribu Warna merupakan sebuah model pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang mengedepankan wajah bahari berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal yang diterjemahkan dalam bentuk gerakan ini pada dasarnya mengambil sisi dari kehidupan secara menyeluruh baik dari sisi manusia, alam maupun infrastruktur itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan dari pada gerakan ini pada dasarnya untuk menjembatani proses pengembangan pembangunan kawasan wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi Bali Baru atau yang lebih dikenal dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

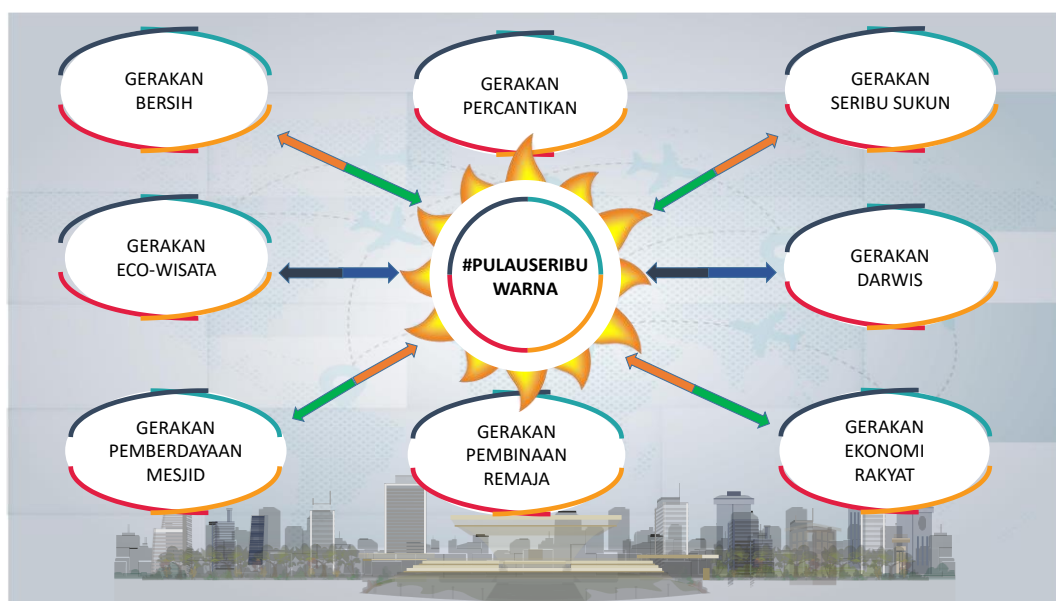
Perlunya dijembatani dikarenakan kepulauan seribu dari sisi amenities, aksesibilitas dan atraksi sebagai indikator dari KSPN memiliki tantangan tersendiri. Dimana diperlukan kerja keras dan koordinasi tidak hanya dengan pemerintah provinsi akan tetapi melibatkan pemerintah pusat.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melihat pentingnya pelibatan komunitas dan masyarakat lokal, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, tidak lain untuk menghindari sebagai penonton dan obyek semata dengan pesatnya perkembangan dunia kepariwisataan sebagai Kawasan Destinasi Bali Baru seperti yang pernah terjadi di Pulau Bali di era tahun 70an. Dapat disimpulkan bahwasanya gerakan yang diambil dari nilai-nilai kearifan lokal ini menargetkan sasaran pembangunan manusia pulau seutuhnya.

Adapun nilai kearifan lokal yang tertuang didalam Gerakan Pulau Seribu Warna meliputi :

- a) Gerakan Percantikan
- b) Gerakan Bersih
- c) Gerakan Seribu Sukun
- d) Gerakan Ekowisata
- e) Gerakan Darwis
- f) Gerakan Ekonomi Rakyat
- g) Gerakan Pemberdayaan Mesjid
- h) Gerakan Pembinaan Remaja,

Dimana korelasinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.5 Pengembangan Pulau Seribu Warna

a) Gerakan Percantikan

Adalah gerakan yang mengubah wajah pulau untuk menjadikan pulau lebih atraktif dan manusiawi dengan memberikan sentuhan warna pada icon-icon bangunan ataupun fasilitas umum di setiap pulau penduduk. Efek visualisasi inilah yang kiranya yang akan mampu memberikan efek psikologis tidak hanya kepada masyarakat pulau akan tetapi juga kepada para wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu baik dari secara dekat maupun dari kejauhan. Dimana gerakan ini didorong tidak hanya menjadi kebijakan internal akan tetapi didorong juga untuk pihak ketiga dalam berpartisipasi.

b) Gerakan Bersih

Adalah gerakan kebersihan pulau dari sampah yang tidak hanya dihasilkan secara domestik akan tetapi juga dari wisatawan dan arus laut sebagai akibat bermuaranya 13 sungai yang melintas di Jakarta dan sungai dari daerah penyangga seperti Cisadane (Tangerang, Provinsi Banten), Citarum (Banten, Provinsi Jawa Barat) beserta anak sungainya ke Laut Jawa.

Kebersihan pulau adalah salah satu prioritas utama dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kep.Seribu. Hal ini dikarenakan menyadari pentingnya arti sebuah kebersihan suatu kawasan sebagai nilai jual didalam mempromosikan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu.

Memang tidak mudah mengurus masalah kebersihan di Kepulauan Seribu dengan segala keterbatasannya sehingga dalam langkahnya, pelibatan masyarakat lokal sebagai penyumbang terbesar dari sampah domestik, kebijakan pusat dan propinsi, pihak ketiga baik dari organisasi masyarakat atau dunia usaha menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten administrasi kep.seribu dalam mencapai keberhasilan penanganan kebersihan di Kepulauan Seribu.

c) Gerakan Seribu Sukun

Kegiatan ini tidak lain menegaskan keberadaan tanaman Sukun tidak hanya sebagai sebuah simbol kabupaten akan tetapi juga menjadi cerminan produk unggulan yang berada ditengah masyarakat Kepulauan Seribu. Disamping itu keberadaan Pohon Sukun yang tumbuh secara sporadis berfungsi sebagai penyangga air tanah bagi pulau-pulau di Kepulauan Seribu demikian juga dengan pemanfaatannya. Melihat potensi dari eksistensi Pohon Sukun ini, pembudayaan yang bersifat masif masih dirasakan perlu dikarenakan tidak hanya untuk mengangkat nilai ekonomis dan harkat dari Pohon Sukun itu sendiri sekaligus perekonomian rakyat berbasis pemanfaatan nilai tambah dari Pohon Sukun dan turunannya.

d) Gerakan Ekowisata

Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memandang perlu keberadaan ekowisata tidak lain dan bukan untuk menjaga keberadaan lingkungan alam dan lingkungan bahari dari kepulauan itu sendiri sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat pulau akan pentingnya keberlangsungan ekosistem pulau atas dampak menggeliatnya pariwisata di Kepulauan Seribu.

e) Gerakan Sadar Wisata (Darwis)

Pada dasarnya makna yang terkandung dalam konsep Sadar Wisata adalah dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan suatu wilayah. Konsep tersebut telah menempatkan posisi dan peran penting masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan baik sebagai tuan rumah (untuk menciptakan lingkungan dan suasana mendukung diwilayahnya) maupun sebagai wisatawan (untuk menggerakkan aktivitas kepariwisata diseluruh wilayah tanah air, mengenali dan mencintai tanah air khususnya budaya setempat)

Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan yang menekankan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta orientasi pembangunan yang mengarah pada 3 (tiga) pilar, yaitu : *Pro Job* (menciptakan lapangan kerja), *Pro Poor* (menanggulangi dan mengurangi kemiskinan) dan *Pro Growth* (mendorong pertumbuhan (pembangunan)). Makna konsep sadar wisata perlu diperdalam agar meningkatkan posisi masyarakat sebagai penerima manfaat yang sebesar-besarnya dari pengembangan kegiatan pariwisata.

f) Gerakan Ekonomi Rakyat

Pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang mengutamakan pada sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana yang dimaksud dengan ekonomi rakyat itu sendiri adalah kegiatan usaha atau ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya

g) Gerakan Pemberdayaan Masjid

Optimalisasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat adalah yang menjadi tujuan dari gerakan pemberdayaan masjid. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melihat bahwasanya lembaga atau institusi yang menaungi kegiatan dan aktifitas masjid mampu berperan melebihi dari sekedar fungsinya yang sekarang yaitu sebagai tempat beribadah semata akan tetapi menjadi institusi sosial yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat.

Pemerintah Kepulauan Seribu memandang bahwasanya mesjid mampu menjadi agen transformasi umat dengan meperluas fungsinya atau dengan kata lain merekonstruksi kembali sebagai sebuah institusi keagamaan yang modern yang dapat memberdayakan masyarakatnya.

h) Gerakan Pembinaan Remaja

Dalam konteks gerakan pembinaan remaja yang dimaksud adalah usaha yang ditempuh oleh seseorang atau kelompok untuk menjadikan remaja lebih baik dari kondisi yang sekarang dihadapinya. Adanya peningkatan dalam arti cara berfikir, bertindak, bersikap terhadap diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat di sekelilingnya

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memandang perlu pembinaan gerakan pembinaan remaja perlu mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan masa remaja adalah masa transisi dan proses pencarian jati diri sebagai manusia . Dikarenakan apabila dimasa ini tidak diperhatikan dan dibina dengan baik dapat menjadi manusia yang salah jalan, menghancurkan dirinya sendiri, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara spesifik melihat tujuan dari gerakan pembinaan remaja adalah sebagai berikut

1. Menggali potensi diri remaja sebagai aset bangsa
2. Membentuk remaja yang bermoral dan berakhlak mulia
3. Menjadikan manusia cerdas dan terampil
4. Meminimalisir terjadinya kenakalan remaja

3. Renovasi Dermaga Kaliadem dan Pembangunan Transportasi Air Laut

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kepulauan Seribu diperlukan dermaga yang baik, kapal yang berkualitas dan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pelayanan sistem transportasi. Secara singkat Potensi yang ditimbulkan dari pengembangan transportasi adalah :



Fasilitas kapal/pelayaran yang memenuhi standar pelayaran sehingga penumpang merasa aman, nyaman, dan puas serta menjadi stimulus wisatawan serta penumpang yang akan berlayar atau berkunjung dan akan kembali ke Kepulauan Seribu.



Kapal Tradisional yang unik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu.



Kebutuhan akan adanya sistem pelayanan transportasi dapat mempermudah serta memberi pelayanan prima kepada pengunjung, seperti : elektronik tiket, *online booking*, dst.



Membuka peluang kolaborasi untuk menyediakan kapal yang dilengkapi dengan akomodasi serta hiburan dan sarana olah raga sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara.



Gambar 3.6 Kondisi Eksisting Aktivitas Dermaga Transportasi Air

4. Pembangunan Terapung (*Floating*)

Dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan jumlah pulau yang tidak bertambah bahkan luas lahan pulau yang semakin berkurang dikarenakan abrasi dan penurunan permukaan tanah pulau menjadikan Kawasan Terbuka Biru sebagai alternatif pembangunan yang menjadi prioritas dan perhatian khusus. Untuk itu Kepulauan Seribu mengupayakan dan memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan pembangunan secara terapung di pulau ini yang memanfaatkan laut dangkal.

Disamping itu, permintaan yang mulai meningkat untuk layanan dan fasilitas Resort kelas menengah/ atas di Kepulauan Seribu. Hal ini akan menjadi destinasi unggulan yang akan berdampak positif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Selain itu konsep pembangunan terapung juga dapat diterapkan dalam pembangunan lapangan olahraga bagi masyarakat Kepulauan Seribu (***Floating Sports Tourism***). Adapun ilustrasi gambar konsep pembangunan terapung (*floating*) disampaikan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Konsep Pembangunan Terapung (*Floating*)

5. Agro Wisata Pulau Tidung Kecil

Tidung Kecil adalah pulau yang memanjang di sebelah timur Pulau Tidung Besar. Terhubung ke Tidung Besar melalui jembatan sepanjang 630 meter (2,070 kaki) yang disebut Jembatan Cinta. Pengembangan Tidung Kecil akan ditujukan untuk menjadi pusat agrowisata. Termasuk pariwisata air, museum Kerangka Paus dan *Camping Ground*. Adapun foto Jembatan Cinta, Museum Kerangka Paus dan Agro Wisata di Pulau Tidung Kecil dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9.



Gambar 3.8 Pulau Tidung Kecil dan Jembatan Cinta

Sumber: Bagian Ekonomi dan Pembangunan



Gambar 3.9 Agro Wisata dan Museum Kerangka Paus Pulau Tidung Kecil

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Perlu digaris bawahi bahwa perumusan isu-isu strategis dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan kata lain isu yang terumuskan adalah isu-isu yang dapat menjadi diberikan solusi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai kewenangannya. Dalam hal ini perumusan isu strategis sangat menghindari munculnya isu-isu yang tidak dapat diberikan solusi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dari tahapan identifikasi permasalahan, maka dapat disintesis beberapa aspek dan permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.



Gambar 3.10 Alur Penetapan Isu Strategis Kabupaten

Ditinjau dari berbagai dimensi telaahan yang telah dilakukan, dapat disintesis aspek dan permasalahannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Lebih lanjut disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini.



Tabel 3.3 Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

PERMASALAHAN	ISU-ISU				ISU STRATEGIS KEPULAUAN SERIBU
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (DKI JAKARTA)	LOKAL (KABUPATEN ADMINISTRASI)	
Rawan bencana banjir rob dan angin putting beliung	Climate change		Ketahanan terhadap bencana	Rawan bencana alam	Optimalisasi Fungsi Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor
Angka kriminalitas masih tinggi		Stabilitas politik, keamanan dan ketertiban		Gangguan keamanan dan ketertiban	
Layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata	Covid-19	Peningkatan SDM	Pembangunan manusia	Sarana prasarana kesehatan dan pendidikan belum optimal	
Organisasi sosial budaya belum berkembang optimal			Pembangunan budaya multikultur	Pelestarian Kesenian dan Budaya belum optimal	
Sarana dan prasarana dasar masih belum merata		Pembangunan infrastruktur	Kota berkelanjutan	Permukiman kumuh, infrastruktur perkotaan belum optimal	
Angka kemiskinan masih tinggi	Green economy	Percepatan pemulihan ekonomi	Ekonomi inklusif	Ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi				Peluang usaha ekonomi belum optimal	
Kewenangan terbatas / lebih bersifat koordinasi, evaluasi dan pengendalian	Globalisasi teknologi	Transformasi pelayanan publik	Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik	Kewenangan penyelenggaraan Kabupaten Administrasi	Kolaborasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasikan			Pemerataan pembangunan	Kerjasama stakeholders terkait	
Partisipasi masyarakat belum optimal				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	

Sumber : Hasil Analisis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022



Dari Tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing Isu Strategis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi lintas sektor/ bidang urusan bersama seluruh stakeholders terkait di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Kolaborasi Peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ke depan yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis yang holistik.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjawab isu strategis aktual. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian program (outcome) perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.

Tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya
yang Memberikan Layanan Publik dan
Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”***

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022

Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2023-2026.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara detail dijelaskan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Nilai	87.33	87.73	88.13	88.70
		Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Optimal	1. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Nilai	85	86	87	88.5
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88.5	88.6	88.7	88.8
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Nilai	88.5	88.6	88.7	88.8

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan yang lebih operasional.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal. Perlu digarisbawahi bahwa perumusan strategi dan arah kebijakan disusun dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. *Dengan kata lain strategi dan arah kebijakan yang terumuskan adalah yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai kewenangannya.*

Tabel 5.1 Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

Eksternal Internal	Peluang (O) : - Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Potensi Perekonomian; - Potensi Pariwisata; - Partisipasi Masyarakat.	Tantangan (T): - Bencana Alam; - Kerusakan Lingkungan; - Keterbatasan Air Bersih dan Listrik; - Kondisi Transportasi dan Dermaga; - Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan; - Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi; - Kondisi Ketahanan Pangan;
Kekuatan (S): - Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; - Adanya Komitmen Pimpinan; - Adanya kuantitas sumberdaya manusia yang dapat diberdayakan;	Alternatif Strategi (S-O): - Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal; - Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKMD; - Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evalulasi pembentukan wirausaha baru.	Alternatif Strategi (S-T): - Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal; - Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyakat dalam proses pembangunan.
Kelemahan (W): - Keterbatasan Kewenangan Wilayah (lebih bersifat koordinatif); - Masih perlu optimalisasi profesionalisme aparatur; - Masih kurangnya infrastruktur baik infrastruktur publik maupun infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan	Alternatif Strategi (W-O): - Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai urusan pelimpahan kewenangan Kabupaten Administrasi yang optimal; - Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik.	Alternatif Strategi (W-T): - Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal; - Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kabupaten Adm Kepulauan Seribu.

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022

5.1.1 Strategi

Sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai urusan pelimpahan kewenangan Kabupaten Administrasi yang optimal.

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain :

1. Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik.
3. Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan optimalisasi manajemen pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
5. Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan urusan sosial, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan, serta fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara detail dapat dilihat pada Tabel 5.2.



**Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026**

TUJUAN RPD : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas (Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi)				
SASARAN RPD : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat (Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat)				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal <i>(Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi)</i>	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Optimal	1. <i>Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi</i>	Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal	- Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. - Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik.
		2. <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan</i>	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal	- Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. - Melakukan optimalisasi manajemen pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
		3. <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan</i>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai urusan pelimpahan kewenangan Kabupaten Administrasi yang optimal	Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan urusan sosial, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan, serta fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal, maka perangkat daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai unsur pembantu Gubernur, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

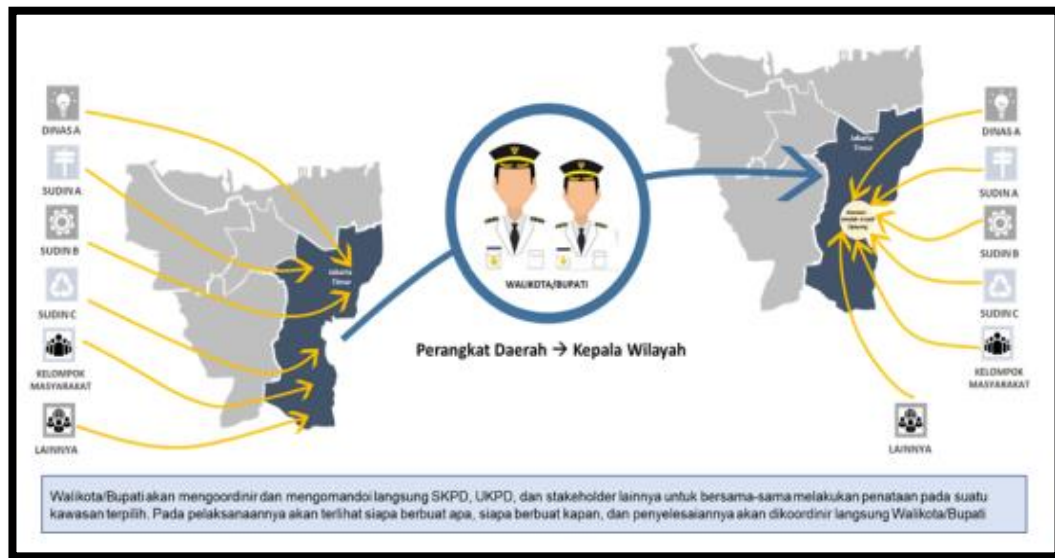
Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, meliputi : Urusan pemerintahan bidang sosial; Urusan pemerintahan bidang perpustakaan; Urusan pemerintahan bidang kearsipan; Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; Urusan pemerintahan bidang kehutanan; Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan; dan Fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

Seluruh entitas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Dalam upaya mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdapat beberapa layanan publik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terkait dengan layanan kemasyarakatan. Layanan ini merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, diantaranya melalui pelaksanaan:

1. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK;
2. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya melalui pengerahan juru pemantau jentik (jumantik);
3. Pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu), melalui pemantauan tumbuh anak dan pemenuhan kecukupan gizi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan lansia;
4. Penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), terutama pada sarana dan prasarana umum yang mendesak untuk ditangani;
5. Pengelolaan ruang interaksi warga/RPTRA;
6. Penyelenggaraan ketertiban umum; serta
7. Pengelolaan Kelurahan melalui penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM

Di samping itu, Bupati sebagai Perangkat Daerah dengan tugas yang bersifat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kepada unsur perangkat/pelaksana teknis sektoral di wilayahnya, juga memiliki peran dalam menata kawasan. Penguatan peran Bupati dalam penataan kawasan ini dilakukan melalui koordinasi implementasi di wilayah (fungsi *lead actor*), serta melaksanakan kolaborasi penuntasan target kegiatan strategis daerah prioritas (fungsi *active supporting actor*) seperti pengendalian banjir/rob, pengurangan sampah, penataan kampung, pemulihan ekonomi pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata, dan aktivasi *city branding* di masing-masing wilayah.



Gambar 6.1. Konsep Penguatan Peran Walikota/Bupati melalui Penataan Kawasan

Sumber : BAB VI Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Dalam hal penataan kawasan, Walikota/Bupati menjadi penanggung jawab di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta evaluasi yang melibatkan multi urusan, multi stakeholders/ pemangku kepentingan, multi tahun dan multi sumber pendanaan sehingga diharapkan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keberlanjutan dari manfaat dan dampak dari suatu kawasan yang sudah selesai ditata dapat terwujud.

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Daerah yang termuat dalam BAB VI Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menargetkan 2 lokasi penataan kawasan pada RPD 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan beberapa upaya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dan simulasi penataan Kawasan dengan seluruh PD/UKPD terkait pada setiap tahapan, kolaborasi dengan pihak swasta/masyarakat untuk mencari sumber pendanaan non-APBD, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kawasan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya kodifikasi dan nomenklatur rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 terdiri atas 18 program, 37 kegiatan, dan 126 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026**

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	46.053.032.428	87,73	50.929.109.822	88,13	53.741.810.978	88,7	58.106.544.741	88,7	208.830.497.969		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	87,72	88,5	46.053.032.428	88,6	50.929.109.822	88,7	53.741.810.978	88,8	58.106.544.741	88,8	208.830.497.969		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	40.740.730.667	4	45.390.111.710	4	47.965.560.069	4	52.081.972.338	4	186.178.374.784	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
														KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
														KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	197.217.380	4	207.078.248	4	217.432.161	4	228.303.769	4	850.031.558	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	197.217.380	1	207.078.248	1	217.432.161	1	228.303.769	4	850.031.558	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	26.786.693.996	4	29.465.363.395	4	32.411.899.734	4	35.653.089.708	4	124.317.046.833	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2023-2026



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	26.786.693.996	12	29.465.363.395	12	32.411.899.734	12	35.653.089.708	48	124.317.046.833	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	8.987.379.644	4	10.306.752.823	4	9.908.586.055	4	10.404.015.356	4	39.606.733.878	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	0	31	755.385.518	32	793.154.793	32	832.812.533	32	874.453.160	127	3.255.806.004	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	949.253.600	12	996.716.280	12	1.046.552.094	12	1.098.879.698	48	4.091.401.672	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	0	175	4.916.459.032	175	5.162.281.983	175	5.420.396.082	175	5.691.415.886	175	21.190.552.983	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	535.333.548	4	562.100.225	4	590.205.236	4	619.715.498	16	2.307.354.507	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	536.300.206	1	563.115.216	1	591.270.977	1	620.834.525	4	2.311.520.924	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	126.192.130	1	132.501.736	1	139.126.823	1	146.083.164	4	543.903.853	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	0	1	870.004.200	0	0	0	0	1	870.004.200	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	1.168.455.610	1	1.226.878.390	1	1.288.222.310	1	1.352.633.425	4	5.036.189.735	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	Nilai	4	4	4.084.350.477	4	4.384.633.816	4	4.709.537.904	4	5.061.254.438	4	18.239.776.635	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.01.02.6.03.04	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Dokumen	12	12	4.084.350.477	12	4.384.633.816	12	4.709.537.904	12	5.061.254.438	48	18.239.776.635	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	



RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2023-2026



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02.6 .04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	4	4	685.089.170	4	1.026.283.428	4	718.104.215	4	735.309.067	4	3.164.785.880	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6 .04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	406.080.000	12	414.201.600	12	422.485.632	12	430.935.344	48	1.673.702.576	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6 .04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	193.060.000	4	196.921.200	4	200.859.624	4	204.876.816	16	795.717.640	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6 .04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	0	1	85.949.170	1	90.246.628	1	94.758.959	1	99.496.907	4	370.451.664	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.02.6 .04.04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	324.914.000	0	0	0	0	1	324.914.000	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4.746.751.937	4	4.945.170.798	4	5.152.732.229	4	5.369.877.789	4	20.214.532.753	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
														KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	1.719.739.269	4	1.805.726.232	4	1.896.012.544	4	1.990.813.171	4	7.412.291.216	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.03.2 .02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	192	192	1.719.739.269	192	1.805.726.232	192	1.896.012.544	192	1.990.813.171	192	7.412.291.216	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	4	3.027.012.668	4	3.139.444.566	4	3.256.719.685	4	3.379.064.618	4	12.802.241.537	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
7.01.03.2 .03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyar akatan	8	8	1.729.721.525	8	1.816.207.601	8	1.907.017.980	8	2.002.368.879	32	7.455.315.985	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
7.01.03.2 .03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyar akatan	0	45	1.297.291.143	90	1.323.236.965	135	1.349.701.705	183	1.376.695.739	183	5.346.925.552	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
														KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		



RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2023-2026


Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	565.549.824	4	593.827.314	4	623.518.680	4	654.694.614	4	2.437.590.432	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	565.549.824	100	593.827.314	100	623.518.680	100	654.694.614	100	2.437.590.432	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.01.04.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	565.549.824	4	593.827.314	4	623.518.680	4	654.694.614	16	2.437.590.432	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	1.176.919.968	87,73	1.216.618.780	88,13	1.258.507.217	88,7	1.379.288.132	88,7	5.031.334.097		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	85	1.176.919.968	86	1.216.618.780	87	1.258.507.217	88,5	1.379.288.132	88,5	5.031.334.097		
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	Nilai	0	85	1.176.919.968	86	1.216.618.780	87	1.258.507.217	88,5	1.379.288.132	88,5	5.031.334.097	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA BAGIAN KEUANGAN UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Sengketa Pertanahan yang ditindaklanjuti	Persen	0	100	1.176.919.968	100	1.216.618.780	100	1.258.507.217	100	1.379.288.132	100	5.031.334.097	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi di Atas 80%	Persen	0	100		100		100		100		100		BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
7.02.02.6 .03.03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Adm	Dokumen	0	4	9.880.000	4	9.880.000	4	9.880.000	4	9.880.000	16	39.520.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA



RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2023-2026



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6 .03.06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	16	21.600.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	1	1	270	1	270	1	270	1	270	4	1.080.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	189.925.040	4	199.421.292	4	209.392.356	4	219.861.974	16	818.600.662	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Adm	Dokumen	0	4	443.143.720	4	465.300.906	4	488.565.951	4	512.994.248	16	1.910.004.825	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	39.000.000	2	39.000.000	2	39.000.000	2	39.000.000	8	156.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	6.500.000	1	6.565.000	1	6.630.650	1	6.696.956	4	26.392.606	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Reha b Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Reha b Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	0	1	16.250.000	1	16.250.000	1	16.250.000	1	16.250.000	4	65.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota	Dokumen	1	1	900	1	900	1	900	1	900	4	3.600.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	540	1	540	1	540	1	540	4	2.160.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	4	4	29.373.790	4	29.373.790	4	29.373.790	4	29.373.790	16	117.495.160	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	0	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	4	480.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	2	2	15.600.000	2	15.600.000	2	15.600.000	2	92.165.000	8	138.965.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	39.000.000	4	42.900.000	4	47.190.000	4	51.909.000	16	180.999.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	19.500.000	4	21.450.000	4	23.595.000	4	25.954.500	16	90.499.500	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6 .03.39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	12	12	213.037.418	12	215.167.792	12	217.319.470	12	219.492.664	48	865.017.344	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6 .03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	28.600.000	4	28.600.000	4	28.600.000	4	28.600.000	16	114.400.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	139.452.677.373	87,73	145.579.458.956	88,13	149.536.812.678	88,7	159.199.496.906	88,7	593.768.445.913		
1.1	MENINGKATKAN KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	85	139.452.677.373	86	145.579.458.956	87	149.536.812.678	88,5	159.199.496.906	88,5	593.768.445.913		
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	138.264.923.293	4	144.384.235.760	4	148.334.045.674	4	157.989.110.659	4	588.972.315.386	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN KEUANGAN	
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															UNIT KERJA TEKNIS 2	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	Persen	35,71	46,43		53,57		64,29		75		75		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	4	87.860.501.141	4	90.057.881.992	4	92.310.258.132	4	94.619.007.483	4	364.847.648.748	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	202	202	87.798.004.241	202	89.992.954.347	202	92.242.778.205	202	94.548.847.660	808	364.582.584.453	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	9	62.496.900	9	64.927.645	9	67.479.927	9	70.159.823	36	265.064.295	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.01.1 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	4	4	189.871.011	4	189.871.011	4	189.871.011	4	189.871.011	4	759.484.044	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	189.871.011	1	189.871.011	1	189.871.011	1	189.871.011	4	759.484.044	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	4	4	838.746.500	4	855.521.430	4	872.631.857	4	890.084.495	4	3.456.984.282	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	9	178.994.500	9	182.574.390	9	186.225.877	9	189.950.395	36	737.745.162	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	493	659.752.000	493	672.947.040	493	686.405.980	493	700.134.100	1972	2.719.239.120	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	4	13.791.092.411	4	14.426.161.812	4	14.836.591.255	4	15.792.448.150	4	58.846.293.628	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	27	27	297.203.455	27	300.175.489	27	303.177.244	27	306.209.016	108	1.206.765.204	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27	27	1.704.982.100	27	1.798.245.931	27	1.896.974.430	27	2.001.520.973	108	7.401.723.434	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	36	1.404.883.656	36	1.475.127.837	36	1.548.884.229	36	1.626.328.440	144	6.055.224.162	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.01.1 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	36	877.331.610	36	894.878.242	36	912.775.807	36	931.031.323	144	3.616.016.982	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	27	101.292.478	27	106.357.100	27	111.674.955	27	117.258.704	108	436.583.237	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	18	18	7.393.158.071	18	7.762.815.974	18	8.150.956.771	18	8.558.504.611	72	31.865.435.427	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															UNIT KERJA TEKNIS 2	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	4	1.474.711.360	4	1.537.287.047	4	1.346.735.564	4	1.671.639.723	16	6.030.373.694	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	4	472.641.781	4	485.088.534	4	497.902.884	4	511.095.802	16	1.966.729.001	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
															UNIT KERJA TEKNIS 2	
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
															BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	
															BAGIAN KEUANGAN	
															BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU																
7.03.01.1 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	64.887.900	1	66.185.658	1	67.509.371	1	68.859.558	4	267.442.487	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	2.033.845.221	4	5.875.244.333	4	2.416.784.077	4	7.024.206.114	4	17.350.079.745	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	3	299.337.253	0	0	5	658.541.957	0	0	8	957.879.210	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	6	266.298.215	8	753.500.000	6	274.287.162	7	282.515.777	27	1.576.601.154	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	1.030.673.296	17	4.636.451.618	17	1.030.673.296	19	6.240.180.060	19	12.937.978.270	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	258.541.957	2	266.298.215	2	274.287.162	2	282.515.777	8	1.081.643.111	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	3	178.994.500	4	218.994.500	3	178.994.500	4	218.994.500	14	795.978.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	11.984.188.279	4	12.598.990.199	4	13.338.422.803	4	14.045.959.347	4	51.967.560.628	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															UNIT KERJA TEKNIS 2	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	189.871.011	12	189.871.011	12	189.871.011	12	189.871.011	48	759.484.044	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
7.03.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	6.703.985.725	12	7.115.202.426	12	7.556.505.133	12	8.030.352.159	48	29.406.045.443	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															UNIT KERJA TEKNIS 1	
															UNIT KERJA TEKNIS 2	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN	



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.01.1 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18	18	567.672.600	18	596.056.230	18	625.859.041	18	657.151.992	72	2.446.739.863	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4.522.658.943	12	4.697.860.532	12	4.966.187.618	12	5.168.584.185	48	19.355.291.278	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL UNIT KERJA TEKNIS 1 KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	21.279.699.950	4	20.064.888.325	4	24.022.242.216	4	25.045.565.303	4	90.412.395.794	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA UNIT KERJA TEKNIS 1 KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	57	4.974.227.310	57	5.668.737.101	57	5.837.537.491	57	6.714.869.809	57	23.195.371.711	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	30	101.694.470	30	103.079.193	30	113.733.152	30	110.669.809	120	429.176.624	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	45	383.467.676	45	402.641.059	45	422.773.111	45	443.911.767	180	1.652.793.613	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	3	15.024.958.724	2	13.061.428.854	7	16.783.985.822	4	16.875.055.022	16	61.745.428.422	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL UNIT KERJA TEKNIS 1 KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	5	203.907.993	5	207.986.152	5	212.145.875	5	216.388.793	20	840.428.813	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	4	591.443.777	4	621.015.966	4	652.066.765	4	684.670.103	16	2.549.196.611	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN	DKI JAKARTA





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.01.1 .14	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Acara Kabupaten	Indeks	4	4	286.978.780	4	315.676.658	4	347.244.323	4	381.968.756	4	1.331.868.517	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
7.03.01.1 .14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	0	1	286.978.780	1	315.676.658	1	347.244.323	1	381.968.756	4	1.331.868.517	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
7.03.02	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	0	85	1.187.754.080	86	1.195.223.196	87	1.202.767.004	88,5	1.210.386.247	88,5	4.796.130.527	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
															BAGIAN KEUANGAN	
															BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
														BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
7.03.02.6 .01	Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan di Atas 80%	Persen	0	95	655.686.660	95	661.168.426	95	666.705.010	95	672.296.959	95	2.655.857.055	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
														BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN		
														BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
7.03.02.6 .01.01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Dokumen	4	4	143.735.160	4	145.172.511	4	146.624.236	4	148.090.479	16	583.622.386	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.02	Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Jumlah Laporan Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Laporan	1	1	37.650.000	1	38.026.500	1	38.406.765	1	38.790.832	4	152.874.097	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.03	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Dokumen	1	1	36.291.500	1	36.654.415	1	37.020.959	1	37.391.168	4	147.358.042	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.04	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten	Jumlah Dokumen Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten yang Disusun dan Dievaluasi	Dokumen	1	1	540	1	540	1	540	1	540	4	2.160.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.05	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten yang Ditingkatkan	Dokumen	12	12	272.000.000	12	274.720.000	12	277.467.200	12	280.241.872	48	1.104.429.072	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.06	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Dokumen	4	4	58.500.000	4	59.085.000	4	59.675.850	4	60.272.608	16	237.533.458	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Dokumen	4	4	18.240.000	4	18.240.000	4	18.240.000	4	18.240.000	16	72.960.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.09	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Dokumen	4	4	20.255.000	4	20.255.000	4	20.255.000	4	20.255.000	16	81.020.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .01.11	Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Laporan	8	12	68.475.000	12	68.475.000	12	68.475.000	12	68.475.000	48	273.900.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.02.6 .02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian di Atas 80%	Persen	0	95	349.072.420	95	350.074.770	95	351.087.144	95	352.109.642	95	1.402.343.976	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
											BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN					
		Persentase Perkara Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	0	95		95		95		95		BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN			
7.03.02.6 .02.01	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Orang	0	350	64.292.740	350	64.292.740	400	64.292.740	400	64.292.740	1500	257.170.960	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.02	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Dokumen	2	2	9.810.000	2	9.810.000	2	9.810.000	2	9.810.000	8	39.240.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.03	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Dokumen	1	4	125.806.000	4	125.806.000	4	125.806.000	4	125.806.000	16	503.224.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.04	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen	4	4	2.160.000	4	2.160.000	4	2.160.000	4	2.160.000	16	8.640.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.07	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Laporan	0	4	37.732.600	4	37.732.600	4	37.732.600	4	37.732.600	16	150.930.400	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.08	PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Dokumen	0	1	9.036.000	1	9.036.000	1	9.036.000	1	9.036.000	4	36.144.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	175	175	66.117.580	175	66.778.755	175	67.446.543	175	68.121.008	700	268.463.886	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .02.11	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	1	1	34.117.500	1	34.458.675	1	34.803.261	1	35.151.294	4	138.530.730	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan di Atas 80%	Persen	0	95	182.995.000	95	183.980.000	95	184.974.850	95	185.979.646	95	737.929.496	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
											BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN					
7.03.02.6 .03.02	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Dokumen	2	2	6.500.000	2	6.565.000	2	6.630.650	2	6.696.956	8	26.392.606	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.05	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Dokumen	2	2	19.950.000	2	20.149.500	2	20.350.995	2	20.554.504	8	81.004.999	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.07	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Dokumen	4	4	17.625.000	4	17.625.000	4	17.625.000	4	17.625.000	16	70.500.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.03.02.6 .03.09	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Dokumen	2	4	24.375.000	4	24.375.000	4	24.375.000	4	24.375.000	16	97.500.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.10	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Dokumen	4	4	22.020.000	4	22.020.000	4	22.020.000	4	22.020.000	16	88.080.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.13	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Dokumen	4	4	20.475.000	4	20.475.000	4	20.475.000	4	20.475.000	16	81.900.000	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.14	Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen	1	1	9.300.000	1	9.393.000	1	9.486.930	1	9.581.799	4	37.761.729	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.15	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dokumen	4	4	16.250.000	4	16.412.500	4	16.576.625	4	16.742.391	16	65.981.516	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
7.03.02.6 .03.17	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Laporan	1	1	46.500.000	1	46.965.000	1	47.434.650	1	47.908.996	4	188.808.646	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
3.4	MENGUATNYA NILAI-NILAI DEMOKRASI, KEBANGSAAN, DAN KEBHINEKAAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	866.445.436	87,73	1.253.185.200	88,13	883.700.188	88,7	884.457.189	88,7	3.887.788.013		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	866.445.436	88,6	1.253.185.200	88,7	883.700.188	88,8	884.457.189	88,8	3.887.788.013		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	438.845.436	51	443.233.890	51,5	447.666.228	52	452.142.890	52	1.781.888.444	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.02.1 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta yang Mendapat Pemahaman terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	0	50	438.845.436	50	443.233.890	50	447.666.228	50	452.142.890	200	1.781.888.444	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.02.1 .01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	0	1	219.422.718	1	221.616.945	1	223.833.114	1	226.071.445	4	890.944.222	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.02.1 .01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	0	50	219.422.718	50	221.616.945	50	223.833.114	50	226.071.445	200	890.944.222	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	8.000.000	51	386.155.310	51,5	8.000.000	52	0	52	402.155.310	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.03.1 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Persen	0	70	8.000.000	70,5	386.155.310	71	8.000.000	71,5	0	71,5	402.155.310	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.03.1 .01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Orang	0	0	0	15	378.155.310	0	0	0	0	15	378.155.310	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.03.1 .01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Laporan	0	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	0	0	3	24.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	419.600.000	51	423.796.000	51,5	428.033.960	52	432.314.299	52	1.703.744.259	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta yang Mendapat Pemahaman Terkait Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Orang	11	11	419.600.000	11	423.796.000	11	428.033.960	11	432.314.299	44	1.703.744.259	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	11	11	262.500.000	11	265.125.000	11	267.776.250	11	270.454.012	44	1.065.855.262	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	3	3	157.100.000	3	158.671.000	3	160.257.710	3	161.860.287	12	637.888.997	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DKI JAKARTA
3.2	MENINGKATNYA KUALITAS DAN HARAPAN HIDUP MELALUI PERBAIKAN KESEHATAN PERKOTAAN															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	4.256.496.319	87,73	5.311.913.615	88,13	4.484.806.420	88,7	5.255.405.967	88,7	19.308.622.321		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	4.256.496.319	88,6	5.311.913.615	88,7	4.484.806.420	88,8	5.255.405.967	88,8	19.308.622.321		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administra	Persen	0	60	1.020.786.758	65	1.320.786.758	70	1.320.786.758	75	1.320.786.758	75	4.983.147.032	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19.02.1 .01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pembedayaan, dan Pengembangan Pemuda	Orang	0	45	1.020.786.758	45	1.170.786.758	45	1.170.786.758	45	1.170.786.758	180	4.533.147.032	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.02.1 .01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0	5	147.752.250	5	147.752.250	5	147.752.250	5	147.752.250	20	591.009.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.02.1 .01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0	0	0	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	30	450.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.02.1 .01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	0	165	873.034.508	165	873.034.508	165	873.034.508	165	873.034.508	660	3.492.138.032	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.02.1 .02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Pemuda Persetujuan dan Supervisi	Persen	0	0	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.02.1 .02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	75	2.621.518.517	80	3.376.935.813	85	2.549.828.618	90	3.320.428.165	90	11.868.711.113	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03.1 .01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan yang dikembangkan	Unit	0	2	1.063.012.894	2	1.818.430.190	2	991.322.995	2	1.761.922.542	8	5.634.688.621	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03.1 .01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Olahraga Provinsi	Unit	0	2	1.063.012.894	2	1.818.430.190	2	991.322.995	2	1.761.922.542	8	5.634.688.621	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03.1 .02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Persen	0	50	395.523.223	50	395.523.223	50	395.523.223	50	395.523.223	50	1.582.092.892	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03.1 .02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	0	1	395.523.223	1	395.523.223	1	395.523.223	1	395.523.223	4	1.582.092.892	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03.2 .05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Orang	0	60	1.162.982.400	60	1.162.982.400	60	1.162.982.400	60	1.162.982.400	240	4.651.929.600	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.03.2 .05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	1	1.162.982.400	1	1.162.982.400	1	1.162.982.400	1	1.162.982.400	4	4.651.929.600	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	4,5	614.191.044	5	614.191.044	5,5	614.191.044	6	614.191.044	6	2.456.764.176	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	0	5	614.191.044	5,5	614.191.044	6	614.191.044	6,5	614.191.044	6,5	2.456.764.176	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	0	16	270.110.634	16	270.110.634	16	270.110.634	16	270.110.634	16	1.080.442.536	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.19.04.1.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit	0	1	344.080.410	1	344.080.410	1	344.080.410	1	344.080.410	1	1.376.321.640	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.4	MENGUATNYA DAYA SAING KOTA MELALUI INOVASI DAN KOLABORASI															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	1.499.269.403	87,73	1.619.540.865	88,13	1.726.275.473	88,7	1.843.683.542	88,7	6.688.769.283		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	1.499.269.403	88,6	1.619.540.865	88,7	1.726.275.473	88,8	1.843.683.542	88,8	6.688.769.283		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	13,5	1.499.269.403	14	1.619.540.865	14,5	1.726.275.473	15	1.843.683.542	15	6.688.769.283	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikelola	Perpustakaan	3	4	1.499.269.403	5	1.619.540.865	5	1.726.275.473	6	1.843.683.542	6	6.688.769.283	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	15	15	970.314.620	15	1.067.346.082	15	1.174.080.690	15	1.291.488.759	15	4.503.230.151	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	0	3500	528.954.783	3500	552.194.783	3500	552.194.783	3500	552.194.783	14000	2.185.539.132	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	760.000.000	87,73	770.000.000	88,13	780.000.000	88,7	780.000.000	88,7	3.090.000.000		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	760.000.000	88,6	770.000.000	88,7	780.000.000	88,8	780.000.000	88,8	3.090.000.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	25	760.000.000	30	770.000.000	40	780.000.000	50	780.000.000	50	3.090.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah lembaga/instansi dan organisasi yang mengelola arsip dinamis sesuai standar kearsipan	lembaga/o rganisasi	0	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	12	780.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	0	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	80	180.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	600.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang dikelola	Unit	0	1	565.000.000	1	575.000.000	1	585.000.000	1	585.000.000	4	2.310.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip	0	1	565.000.000	1	575.000.000	1	585.000.000	1	585.000.000	4	2.310.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.5	BERKEMBANGNYA KAPASITAS, PROFESIONALITAS, DAN IKLIM KERJA APARATUR															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	39.000.000	87,73	39.000.000	88,13	39.000.000	88,7	39.000.000	88,7	156.000.000		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	39.000.000	88,6	39.000.000	88,7	39.000.000	88,8	39.000.000	88,8	156.000.000		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	0	3	39.000.000	3	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	156.000.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Layanan Kepegawaian ASN	Persen	0	85	39.000.000	90	39.000.000	95	39.000.000	100	39.000.000	100	156.000.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	5	39.000.000	5	39.000.000	5	39.000.000	5	39.000.000	20	156.000.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA
1.2	TERCAPAINYA PERBAIKAN POLA AKTIVITAS DAN MOBILITAS MELALUI PENGEMBANGAN KOTA BERORIENTASI TRANSIT															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	16.898.241.496	87,73	18.385.388.646	88,13	20.036.208.336	88,7	18.448.367.325	88,7	73.768.205.803		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	16.898.241.496	88,6	18.385.388.646	88,7	20.036.208.336	88,8	18.448.367.325	88,8	73.768.205.803		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	0	4	16.898.241.496	4	18.385.388.646	4	20.036.208.336	4	18.448.367.325	4	73.768.205.803	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Kabupaten Administrasi yang Terpelihara dengan Baik	KM	39	41	16.898.241.496	43	18.385.388.646	45	20.036.208.336	47	18.448.367.325	47	73.768.205.803	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah	Titik	0	200	10.390.044.849	225	11.405.152.499	250	12.545.667.748	275	10.405.877.810	275	44.746.742.906	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
		Panjang Jalan yang Dibangun	KM	0	0		0		0		0		0		UNIT KERJA TEKNIS 2	





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.10.1 .01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	1	2.528.191.657	1	2.781.010.823	1	3.059.111.905	1	3.365.023.096	4	11.733.337.481	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
1.03.10.1 .01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0	2	3.980.004.990	2	4.199.225.324	2	4.431.428.683	2	4.677.466.419	8	17.288.125.416	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
2.3	BERKURANGNYA KETIMPANGAN SERTA TERJAMINNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	1.428.740.100	87,73	1.428.740.100	88,13	2.200.624.195	88,7	2.270.795.477	88,7	7.328.899.872		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	1.428.740.100	88,6	1.428.740.100	88,7	2.200.624.195	88,8	2.270.795.477	88,8	7.328.899.872		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	95	1.428.740.100	95	1.428.740.100	95	2.200.624.195	95	2.270.795.477	95	7.328.899.872	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
1.06.06.1 .01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase ketersediaan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persen	0	95	1.353.740.100	95	1.353.740.100	95	1.353.740.100	95	1.353.740.100	95	5.414.960.400	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
1.06.06.1 .01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	0	1200	653.740.100	1200	653.740.100	1200	653.740.100	1200	653.740.100	4800	2.614.960.400	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
1.06.06.1 .01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	0	500	700.000.000	500	700.000.000	500	700.000.000	500	700.000.000	2000	2.800.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
1.06.06.2 .02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	85	75.000.000	85	75.000.000	85	846.884.095	85	917.055.377	85	1.913.939.472	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
1.06.06.2 .02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA
1.06.06.2 .02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	11	771.884.095	11	842.055.377	11	1.613.939.472	UNIT KERJA TEKNIS 1	DKI JAKARTA





Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3	TERCAPAINYA PEMULIHAN EKOSISTEM KOTA DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON															
1	TERWUJUDNYA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KABUPATEN WISATA BAHARI, RELIGI, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai	0	87,33	24.440.567.368	87,73	26.884.624.106	88,13	29.573.086.517	88,7	32.530.395.167	88,7	113.428.673.158		
1.1	MENINGKATKAN KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	Nilai	0	88,5	24.440.567.368	88,6	26.884.624.106	88,7	29.573.086.517	88,8	32.530.395.167	88,8	113.428.673.158		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	100	100	24.440.567.368	100	26.884.624.106	100	29.573.086.517	100	32.530.395.167	100	113.428.673.158	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara dan Terpenuhi Kebutuhan Sarana Prasarananya	Persen	100	100	24.440.567.368	100	26.884.624.106	100	29.573.086.517	100	32.530.395.167	100	113.428.673.158	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	0	2,76	24.440.567.368	3,45	26.884.624.106	3,55	29.573.086.517	3,71	32.530.395.167	3,71	113.428.673.158	UNIT KERJA TEKNIS 2	DKI JAKARTA

Keterangan :

	= Tujuan RENSTRA
	= Sasaran RENSTRA
	= Program
	= Kegiatan
	= Sub Kegiatan

Sumber : Data Tarikan Sistem E-RPD Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 (<https://rpd.bapedadki.net/>)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bidang urusan yang diemban oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain Bidang Urusan Kabupaten/Kota dan Kecamatan Administrasi; Bidang Kepegawaian; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Sosial; Bidang Perpustakaan; Bidang Kearsipan; serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selain itu, instrumen tersebut juga digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Indikator kinerja tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	0 Nilai	87,33 Nilai	87,73 Nilai	88,13 Nilai	88,7 Nilai	88,7 Nilai
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	1. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	0 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,50 Nilai	88,50 Nilai
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	0 Nilai	88,5 Nilai	88,6 Nilai	88,7 Nilai	88,8 Nilai	88,8 Nilai
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	0 Nilai	88,5 Nilai	88,6 Nilai	88,7 Nilai	88,8 Nilai	88,8 Nilai

Sumber : Data Tarikan Sistem E-RPD Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 (<https://rpd.bapedadki.net/>)

Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja eselon III selama empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.2. Seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel tersebut merupakan indikator kinerja program yang termuat dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program (*Outcome*)
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026**

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Efektivitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	0 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,5 Nilai	88,5 Nilai
2.	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	0 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,5 Nilai	88,5 Nilai
3.	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	0 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,5 Nilai	88,5 Nilai
4.	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	35,71 Persen	46,43 Persen	53,57 Persen	71,43 Persen	92,86 Persen	92,86 Persen
5.	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
6.	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
10.	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi	50 Persen	50,5 Persen	51 Persen	51,5 Persen	52 Persen	52 Persen
11.	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	50 Persen	50,5 Persen	51 Persen	51,5 Persen	52 Persen	52 Persen

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	50 Persen	50,5 Persen	51 Persen	51,5 Persen	52 Persen	52 Persen
13.	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Persen	4.5 Persen	5 Persen	5.5 Persen	6 Persen	6 Persen
14.	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	75 Persen
15.	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen
16.	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
17.	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Persen	13.5 Persen	14 Persen	14.5 Persen	15 Persen	15 Persen
18.	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Persen	25 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen
19.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	0 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
21.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	0 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen

Sumber : Data Tarikan Sistem E-RPD Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 (<https://rpd.bapedadki.net/>)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diturunkan dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Dokumen RENSTRA ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sehingga Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan selama periode RENSTRA dan evaluasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
2. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
3. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta dalam rangka mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil kinerja RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.



**SUBKOORDINATOR URUSAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2022**